

**ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA TERHADAP
PENYELESAIAN KONFLIK NAGORNO-KARABAKH TAHUN 2008-**

2020

TUGAS AKHIR



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

AHNAF ARKANATA YUMNA

18323077

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA TERHADAP
PENYELESAIAN KONFLIK NAGORNO-KARABAKH TAHUN 2008 –
2020**

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

AHNAF ARKANATA YUMNA

18323077

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Kebijakan Luar Negeri Rusia Terhadap Penyelesaian Konflik
Nagorno-Karabakh Tahun 2008 – 2020**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal
10 Juli 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 2 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 3 Alfredha Shinta Putri, S.IP., M.H.I.

Three handwritten signatures in black ink, each written on a horizontal line. The signatures are stylized and difficult to read.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal tugas akhir ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Rabu, 9 Juli 2025



Ahnaf Arkanata Yumna

DAFTAR ISI

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK NAGORNO-KARABAKH TAHUN 2008-2020... I	
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	IV
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR GAMBAR	VII
DAFTAR TABEL.....	VIII
DAFTAR SINGKATAN	IX
ABSTRAK.....	X
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Cakupan penelitian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka	5
1.6 Kerangka Pemikiran.....	8
1.7 Argumen Sementara.....	12
1.8 Metode Penelitian.....	13
1.8.1 Jenis Penelitian	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	13
1.8.4 Proses Penelitian	14
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB 2	16
KONFLIK WILAYAH NAGORNO-KARABAKH OLEH ARMENIA DAN AZERBAIJAN	16
2.1 Konflik Armenia-Azerbaijan	16
2.2 Aktor-Aktor dalam Konflik Nagorno-Karabakh.....	26
2.3 Upaya Perdamaian oleh Rusia	28
BAB 3	38
ANALISIS MEDIASI TERKAIT PELAKSANAAN MEDIASI OLEH RUSIA KONFLIK AZERBAIJAN-ARMENIA DI NAGORNO-KARABAKH TAHUN 2020.....	38
3.1 Identifikasi Karakteristik Konflik Nagorno-Karabakh	39

3.2. Peran & Strategi Rusia	41
3.3 Hasil Mediasi oleh Rusia	51
BAB 4 PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Skema Model *Contingency* Bercovitch

Gambar 2: Peta Wilayah Pertempuran pihak Armenia dan Azerbaijan

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Skema Model *Contingency* Bercovitch

DAFTAR SINGKATAN

AMD	: <i>Armenian Dram</i>
CBCP	: <i>the Caucasian Bureau of the Communist Party</i>
CBM	: <i>Confidence Building Measures</i>
CIS	: <i>Commonwealth of Independent States</i>
CSTO	: <i>Collective Security Treaty Organization</i>
EEU	: <i>Eurasian Economic Union</i>
HHK	: <i>Hayastani Komunistakan Kusaktsutyun</i>
ICRC	: <i>International Committee of the Red Cross</i>
KTT	: <i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
PBB	: <i>Persatuan Bangsa-Bangsa</i>
SSR	: <i>Azerbaijani Soviet Socialist Republic</i>
YAP	: <i>Yeni Azerbaijan Partiyasi</i>

ABSTRAK

Konflik antara Armenia-Azerbaijan terkait sengketa wilayah Nagorno-Karabakh menjadi persoalan yang cukup kompleks dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik Armenia-Azerbaijan menjadi konflik etnis serta perebutan wilayah yang tak kunjung menemukan titik terang. Rusia sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di wilayah kaukasus menginginkan kestabilan wilayah agar kepentingan dalam dan luar negeri Rusia tidak terganggu atas konflik tersebut terutama dari sektor politik maupun ekonomi, sehingga Rusia ingin terlibat sebagai penengah konflik atau moderator dalam usaha perdamaian konflik di Nagorno-Karabakh.

Penulis menggunakan kerangka pemikiran *International Mediaton Theory* yang dikemukakan oleh Jacob Bercovitch untuk menganalisis peran Rusia sebagai mediator konflik antara Armenia-Azerbaijan di wilayah sengketa Nagorno-Karabakh, dimana mediasi yang dilaksanakan harus berjalan tanpa intervensi berlebihan, tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan sesuai hukum yang berlaku, serta *International Mediaton Theory* menjadi acuan sebagai indikator keberhasilan dalam mediasi konflik Armenia-Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh di tahun 2020. Rusia dalam menjalankan mediasi dianggap telah memenuhi peran serta tanggung jawab sebagai pihak ketiga atau mediator dengan berperan aktif dan memfasilitasi dengan baik setiap proses perdamaian yang dilakukan oleh Armenia dan Azerbaijan serta menghasilkan kesepakatan-kesepakatan positif dari beberapa proses mediasi yang di mediasi oleh Rusia.

Kata-kata kunci: Konflik Armenia-Azerbaijan, Mediasi, Nagorno-Karabakh, Rusia.

ABSTRACT

The conflict between Armenia and Azerbaijan regarding the Nagorno-Karabakh region is a quite complex problem that has been going on for decades. Russia, as a country that has great influence in the Caucasus region, wants regional stability so that Russia's domestic and foreign interests are not disturbed by the conflict, especially from the political and economic sectors, so Russia wants to be involved as a conflict mediator or moderator in efforts to peace the conflict in Nagorno-Karabakh.

The author uses the International Mediation Theory framework proposed by Jacob Bercovitch to analyze Russia's role as a mediator in the Armenian and Azerbaijani conflict in the Nagorno-Karabakh region, where the mediation carried out must take place without excessive intervention, not using violent methods and in accordance with applicable law, as well as International Mediation Theory as a reference as an indicator of success in mediating the Armenia-Azerbaijan conflict in the Nagorno-Karabakh region in 2020. Russia in carrying out mediation is considered to have fulfilled its role and responsibility as a mediator by playing an active role and facilitating well in every peace process carried out by Armenia and Azerbaijan and produced positive agreements from several mediation processes mediated by Russia.

Key Words: Armenia-Azerbaijan conflict, Mediation, Nagorno-Karabakh, Russia.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nagorno-Karabakh merupakan sebuah wilayah dengan sebagian besar kawasannya berupa pegunungan, dan Nagorno-Karabakh memiliki luas kurang lebih 4.400km^2 dan dengan populasi penduduk sejumlah 146.573 jiwa. Mayoritas penduduk di wilayah ini merupakan etnis Armenia, akan tetapi Nagorno-Karabakh sendiri secara geografis terletak di wilayah Azerbaijan. Wilayah Nagorno-Karabakh dianggap cukup strategis dikarenakan wilayah tersebut menghubungkan kawasan Asia dan Eropa. Selain itu wilayah Nagorno-Karabakh menyimpan potensi minyak bumi dan gas alam yang cukup melimpah.

Setelah memperoleh kemerdekaannya, wilayah Nagorno-Karabakh telah diakui oleh internasional menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Azerbaijan. Adanya ketidakselarasan antara letak geografis dan etnis mayoritas penduduk di wilayah Nagorno-Karabakh memunculkan permasalahan baru di wilayah tersebut. Wilayah yang saling berselisih mengenai Nagorno-Karabakh tumbuh seiring dengan konflik etnis yang muncul pada tahun-tahun menjelang berdirinya Armenia dan Azerbaijan pada tahun 1918. Dimulai pada tahun 1988, ketika otoritas Soviet melemah akibat kebijakan Glasnost, sentimen nasionalis muncul kembali di kedua republik tersebut dan berkembang menjadi konflik kekerasan yang berpusat di Karabakh. Setelah dibubarkannya Uni Soviet, konflik tersebut meningkat menjadi perang dengan skala penuh. Pertempuran berlanjut hingga Rusia mengumumkan gencatan senjata pada tahun 1994 antara Azerbaijan, Armenia, serta pemerintahan *de facto* wilayah Nagorno-Karabakh. Perang berakhir dengan orang-orang Armenia

menguasai wilayah Nagorno-Karabakh dan tujuh distrik di sekitarnya yang luasnya hanya kurang dari seperlima wilayah Azerbaijan. Dalam 19 tahun sejak gencatan senjata (Mayer 2013).

Berdasarkan artikel jurnal "*Why Autonomy? The Making of Nagorno-Karabakh Autonomous Region 1918-1925*", Jauh sebelum konflik besar tahun 1988-1994 yakni pada Desember 1920 sesuai dengan keputusan Stalin, "*Commissar of Nationalities*" memberikan wilayah Nagorno-Karabakh kepada bangsa Armenia dan selanjutnya pada 1921 *the Caucasian Bureau of the Communist Party (CBCP)* juga memutuskan status Nagorno-Karabakh untuk diberikan kepada bangsa Armenia. Akan tetapi sehari setelah putusan tersebut dibuat, Nariman Narimanov pemimpin bangsa Azerbaijan mengajukan protes terhadap hasil tersebut hingga pada akhirnya *the Caucasian Bureau of the Communist Party (CBCP)* menyatakan bahwa Nagorno-Karabakh adalah bagian dari wilayah Azerbaijan karena wilayah Nagorno-Karabakh secara geografis masuk ke dalam wilayah Azerbaijan dan letak wilayahnya lebih dekat dengan wilayah pusat Azerbaijan. CBCP juga memberikan kontrol penuh wilayah Nagorno-Karabakh kepada Azerbaijan, sehingga keputusan *the Caucasian Bureau of the Communist Party (CBCP)* memberikan wilayah Nagorno-Karabakh kepada Azerbaijan tersebut memunculkan pertentangan dari penduduk Nagorno-Karabakh yang mayoritas merupakan etnis Armenia. Pihak Armenia merasa keputusan CBCP dan pemerintah Soviet merupakan tindakan sewenang-wenang. Armenia menyatakan bahwa Azerbaijan telah menekan etnis Armenia di Nagorno-Karabakh untuk meningkatkan jumlah penduduk etnis Azeri dan menguasai wilayah tersebut.

Konflik dengan skala yang cukup besar antara etnis Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh terjadi sebanyak 2 kali tepatnya pada tahun 1988-1991 dan 1992-1994. (Zurich 2013). Intensitas konflik antara Azerbaijan dan Armenia menjadi semakin meningkat setelah disintegrasi Uni Soviet sebelum akhirnya muncul gencatan senjata pada tahun 1994 (Firman 2019). Pada tahun 1994 tersebut pihak Armenia dan Azerbaijan sepakat menandatangani perjanjian untuk melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata pada tahun 1994 tersebut merupakan hasil dari mediasi langsung Armenia dan Azerbaijan yang dimediasi oleh Rusia dan sebuah organisasi keamanan dan kerja sama di Eropa yakni *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) Minsk Group.

Permasalahan dari konflik di Nagorno-Karabakh secara singkat dapat dipahami melalui dua argumen utama, yaitu Armenia mendukung wilayah Nagorno-Karabakh merdeka secara penuh dari Azerbaijan atas dasar etnis mayoritas di wilayah Nagorno-Karabakh didominasi oleh etnis Armenia (DocGo 2017). Sementara itu pihak Azerbaijan sangat menolak untuk melepaskan dan memberikan kemerdekaan kepada Nagorno-Karabakh yang didasari oleh prinsip untuk mempertahankan integritas wilayah Nagorno-Karabakh yang secara *de facto* dan *de jure* diberikan oleh Uni Soviet serta diakui secara internasional sejak tahun 1923 (MFA Azerbaijan 2018).

Konflik ini merupakan konflik yang sangat serius yang membuat perhatian internasional tertuju kepada konflik ini dikarenakan konflik Nagorno-Karabakh adalah konflik wilayah yang melibatkan dua negara bekas Uni Soviet ini. Tentunya dari konflik ini kedua belah pihak mengalami kerugian baik dari korban jiwa maupun wilayah yang saling diperebutkan. Oleh karena itu salah satu organisasi

besar di Eropa yaitu *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) dan beberapa negara besar salah satunya Rusia yang memiliki peran penting ikut turun tangan dalam upaya-upaya perdamaian antara Armenia dan Azerbaijan. Dari sepuluh konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh *co-chairman OSCE Minsk Group*, Rusia menjadi mediator dalam delapan pertemuan, yang berlangsung pada tanggal 2 November di Moskow, 4 Juni 2009 di St. Petersburg, 18 Juli 2009 di Moskow, 25 Januari 2010 di Sochi, 17 Juni 2010 di St. Petersburg, 27 Oktober 2010 di Astrakhan, 5 Maret 2011 di Sochi, 24 Juni 2011 di Kazan, dan 23 Januari 2012 di Sochi.

Upaya-upaya menempuh jalan damai antara Armenia dan Azerbaijan sudah sering dilakukan tetapi tidak menemui titik terang. Sejak akhir tahun 90-an Rusia dan beberapa negara di sekitar Armenia-Azerbaijan serta organisasi seperti *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) dan PBB sendiri sudah sering melakukan upaya penyelesaian konflik yang tak kunjung usai ini. Sejak 2008 Rusia dianggap sebagai mediator paling aktif dalam konflik Nagorno-Karabakh dan telah berperan banyak dalam forum mediasi Azerbaijan-Armenia, akan tetapi saha-usaha tersebut tidaklah selamanya membuahkan hasil yang baik dikarenakan permasalahan-permasalahan yang terus muncul antara kedua belah pihak.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pemerintah Rusia melaksanakan mediasi pasca konflik Azerbaijan-Armenia di Nagorno-Karabakh sejak tahun 2008-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan kepentingan Pemerintah Rusia dalam konflik Nagorno-Karabakh.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi mediasi Pemerintah Rusia dalam penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator keberhasilan Pemerintah Rusia sebagai mediator dalam proses perdamaian antara Armenia-Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus pada kebijakan berupa strategi mediasi serta peran Pemerintah Rusia terhadap konflik yang melibatkan Armenia dan Azerbaijan tahun 2008 hingga 2020, dengan konflik yang meliputi wilayah utama sengketa yaitu Nagorno-Karabakh serta pengaruh kebijakannya terhadap upaya penyelesaian konflik tersebut. Pembahasan dari penelitian ini juga meliputi penyebab konflik Armenia dan Azerbaijan yang disebabkan adanya perbedaan etnis serta diskriminasi dan kekerasan. Dalam penelitian ini juga membahas peran dan usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik atau pihak ketiga baik negara-negara maupun organisasi internasional. Terakhir, penelitian ini membahas mengenai seberapa penting peran dan pengaruh Rusia terhadap perdamaian di wilayah Nagorno-Karabakh.

1.5 Tinjauan Pustaka

Jurnal dan pembahasan mengenai konflik antara Azerbaijan dan Armenia di Nagorno-Karabakh telah banyak diteliti sebelumnya. Beberapa jurnal yang membahas kemiripan permasalahan, analisa, dan teori dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Berikut merupakan jurnal penelitian terdahulu yang membahas mengenai konflik Nagorno-Karabakh:

Pertama, jurnal penelitian yang berjudul Analisis Peran Rusia sebagai Mediator dalam Penyelesaian Konflik Nagorno Karabakh Periode 2008-2016 oleh Andhika Dewantara dan Muhammad Yamin, dalam *Insignia Journal of International Relations* 2019. Jurnal tersebut digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kualitatif yang menggunakan data sekunder, dan juga menggunakan teori model kontingensi yang dicetuskan oleh Jacob Bercovitch Bersama koleganya untuk mengevaluasi peranan Rusia sebagai mediator konflik Nagorno Karabakh periode 2008-2016. Pada jurnal tersebut menyebutkan bahwa peran Rusia sebagai mediator dalam konflik Nagorno Karabakh tidak bisa disebut sukses. Hal ini karena mediasi tersebut gagal mencapai indikator utama, yaitu kesepakatan damai yang dibuat oleh pihak ketiga dan diterapkan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang berkonflik setelah proses mediasi dan resolusi. Dalam perannya sebagai mediator, Rusia hanya melakukan manajemen konflik untuk mencegah kekerasan lebih lanjut di Nagorno-Karabakh. Mereka tidak mencapai penyelesaian tuntas atas akar permasalahan konflik antara Armenia, Azerbaijan, dan Nagorno-Karabakh. Akibatnya, konflik di Nagorno-Karabakh terus berlanjut seiring dengan peran mediasi Rusia yang tidak disertai dengan niat tulus dari kedua negara yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan damai (Dewantara, 2019).

Kedua, analisis yang berjudul Nagorno-Karabakh Embedded in Geopolitics oleh Françoise J. Companjen dalam jurnal *Atlantisch Perspectief*. Analisis tersebut mengenai dasar-dasar permasalahan seputar konflik Nagorno-Karabakh dan juga sejarah konflik serta jurnal tersebut membahas tentang permasalahan pasca kemerdekaan Armenia-Azerbaijan dari Uni Soviet dengan solusi-solusi perdamaian

antar kedua negara. Kekurangan jurnal tersebut kurang adanya pembahasan yang jelas mengenai keterlibatan maupun kebijakan pemerintah Rusia.

Salah satu hal yang menarik dari jurnal tersebut adalah solusi damai atas konflik tersebut yang dimana jika solusi sempurna terlalu sulit dicapai maka sebuah teori yaitu teori konflik merekomendasikan untuk fokus pada proses seperti melibatkan masyarakat di wilayah Nagorno-Karabakh untuk berdiskusi secara umum mengenai masa depan wilayah tersebut. Kemudian referendum dengan cara pemungutan suara yang adil dan melibatkan seluruh warga dan juga pengungsi dari wilayah tersebut. (Companjen, Françoise, 2010)

Ketiga, jurnal yang berjudul *Armenia and the South Caucasus: A New Security Environment*, oleh Anthony R. Branch dalam *Connections* 17, no. 2 (2018) ini membahas mengenai geopolitik dan lingkungan keamanan Kaukasus, dan khususnya tantangan keamanan yang akan dihadapi Armenia selama ini dan kedepannya. Karena Kaukasus Selatan diperkuat oleh keamanan kolektif perjanjian dan konflik stagnan atas Nagorno-Karabakh, wilayah tersebut pergeseran dinamis secara bertahap. Kemudian jurnal ini juga membahas mengenai peristiwa sejarah yang signifikan, seperti Pipa Baku-Tbilisi-Ceyhan, flare-up Karabakh April 2016 dan penyelesaian Saluran Pipa Trans-Anatolia memberikan fondasi untuk analisis condong ke depan. (Branch, Anthony, 2018). Kekurangan dari jurnal tersebut adalah hanya membahas dari sisi Armenia tanpa menambahkan pembahasan dari sisi lain.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas seputar Nagorno-Karabakh. Penelitian ini lebih fokus untuk membahas

mengenai peran dan pengaruh kebijakan luar negeri Rusia terhadap konflik perebutan wilayah Nagorno-karabakh tahun 2020.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini penulis menggunakan *International Mediation Theory* atau pendekatan resolusi konflik dalam versi yang dikemukakan oleh Jacob Bercovitch sebagai acuan untuk menganalisa persoalan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam teori mediasi internasional tersebut Bercovitch menjelaskan bahwa mediasi adalah sebuah proses manajemen konflik dimana pihak yang bersengketa mencari atau menerima tawaran bantuan dari pihak ketiga, baik dari individu, kelompok, negara atau organisasi untuk mengubah, mempengaruhi persepsi atau perilaku mereka tanpa menggunakan cara-cara kekerasan (Bercovitch, 1991).

Menurut (Bercovitch 1991), bentuk manajemen konflik oleh pihak ketiga pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua kategori, yang pertama adalah legalistik-normatif seperti misalnya adjudikasi dan arbitrase yang dimana mengandalkan para pihak untuk mematuhi keputusan yang ditentukan oleh pihak ketiga. Kedua adalah prosedur sukarela seperti misalnya mediasi, dan konsiliasi yang dimana melibatkan berbagai bentuk bantuan dan fasilitasi.

Bercovitch juga menjelaskan yang dimaksud dengan batasan-batasan dari aktivitas pihak ketiga atau pihak luar yang dimana aktivitas tersebut harus dapat diterima oleh kedua pihak yang berkonflik, dan aktivitas tersebut juga harus dimaksudkan untuk meredakan atau menyelesaikan sengketa internasional tanpa menggunakan paksaan atau menggunakan aturan yang berwenang.

Bercovitch telah mengidentifikasi tiga faktor yang menjadikan mediasi berjalan efektif. Pertama, pihak-pihak yang terlibat konflik bersedia untuk melakukan mediasi yang di mediasi oleh pihak ketiga dan bersedia untuk menyelesaikan konflik dengan mencari solusi yang tepat. Kedua, pihak-pihak yang terlibat konflik harus mempercayai pihak ketiga yang ditentukan bersama untuk menjadi penengah atau mediator konflik serta, pihak ketiga atau mediator juga dapat memberikan jaminan dan kepercayaan kepada pihak-pihak yang berkonflik. Ketiga, hubungan antara pihak-pihak yang berselisih, dimana aktor-aktor dalam konflik dan yang terlibat dalam usaha atau proses penyelesaian konflik harus memantau dan mengusahakan hubungan antara pihak-pihak yang berselisih harus terjalin dengan baik dan menuju ke arah yang positif, sehingga perdamaian dapat tercapai.

(Bercovitch 1991) telah mengidentifikasi berbagai strategi mediasi yang dapat digunakan oleh para mediator untuk menyelesaikan dan mengelola konflik. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai strategi mediasi oleh Jacob Bercovitch:

1. Bercovitch telah mengidentifikasi dua kategori utama strategi mediasi: direktif dan fasilitatif. Mediasi direktif melibatkan mediator dengan mengambil peran aktif dalam proses, menawarkan pendapat, dan membuat saran. Seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya bahwa mediator fasilitatif melibatkan mediator yang menciptakan lingkungan fasilitatif dan minim intervensi dimana kedua belah pihak yang bersengketa dapat berbicara secara relatif terbuka tentang apa yang mereka setuju dan tidak setuju, dan kemudian menjembatani

kesenjangan tersebut melalui komunikasi langsung, dengan mediator bertindak sebagai perantara.

2. Bercovitch telah menemukan bahwa mediator yang menggunakan strategi direktif lebih berhasil dalam mengelola konflik internasional daripada mereka yang menggunakan strategi fasilitatif. Namun, ia juga mencatat bahwa keefektifan strategi bergantung pada konteks atau kondisi konflik.
3. Bercovitch juga mengatakan tentang pentingnya ketidak berpihakan dalam mediasi dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah mediasi. Namun Bercovitch juga memiliki pendapat lain bahwa "mediasi yang efektif adalah mediasi yang dapat memanfaatkan sumber daya, daya jual dan pengaruh daripada masalah ketidakberpihakan".

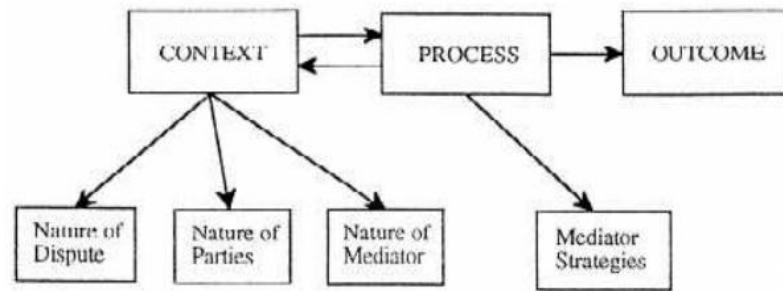
Menurut Bercovitch Mediasi fasilitatif adalah jenis mediasi yang biasanya didefinisikan mempunyai peran dalam memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih, melibatkan tindakan dan intervensi terbatas oleh mediator. Mediasi fasilitatif merupakan jenis mediasi yang minim intervensi dibandingkan jenis mediasi lainnya. Berdasarkan pemikiran Jacob Bercovitch, penulis menyimpulkan bahwa di dalam mediasi fasilitatif, mediator berperan untuk menciptakan lingkungan fasilitatif dimana mediator memberikan fasilitas untuk kedua belah pihak yang bersengketa dapat bertemu dan berdialog secara terbuka untuk menyelesaikan dan mencari solusi atas perselisihan. Mediator tidak menawarkan solusi atau membuat keputusan bagi para pihak, melainkan membantu mereka mengeksplorasi atau mengidentifikasi kepentingan bersama dan kebutuhan mereka serta menemukan titik temu atau solusi yang saling menguntungkan. Mediasi fasilitatif umumnya merupakan bentuk mediasi yang paling sederhana dan

minimnya intervensi, hal ini dikarenakan peran mediator hanya sebagai “pengawas” dan “pemandu” serta fasilitator dalam berjalannya sebuah mediasi tanpa melakukan intervensi dan paksaan. Dalam konsep mediasi oleh Bercovitch, tingkat efektifitas dan keberhasilan sebuah mediasi dapat di ukur dengan beberapa poin seperti :

- a) Kesiapan dan ketersediaan pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi.
- b) Kapabilitas Mediator dalam melakukan mediasi.
- c) Kondisi sosial dan politik antara mediator dengan pihak-pihak yang bersengketa.
- d) Pengaruh pihak ketiga selain mediator.

Mediasi tidak menjamin hasil yang ideal atau bahkan sempurna, akan tetapi dapat memberikan dasar atau landasan bagi pihak yang berselisih untuk mengidentifikasi, menyusun, serta membahas permasalahan mereka. Dalam proses mediasi, pihak-pihak yang berkonflik memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab atas hasil negosiasi. Peran mediator hanyalah sebagai fasilitator komunikasi yang bertugas menggambarkan dan menjelaskan isu-isu, serta memberikan rekomendasi solusi. Oleh karena itu, hasil dari mediasi akan lebih dipengaruhi oleh interaksi antara pihak-pihak yang berkonflik dan variabel proses terkini, daripada hanya tergantung pada mediator, seperti yang digambarkan dalam skema berikut.

Gambar 1: Skema Model *Contingency* Bercovitch



Dengan menggunakan konsep mediasi dari Bercovitch akan menjawab manakah strategi mediasi yang efektif dan tepat terhadap permasalahan Nagorno-Karabakh, antara direktif atau fasilitatif atau menggabungkan keduanya. Mediasi oleh Bercovitch tersebut juga dapat menganalisis tingkat keberhasilan Rusia dalam menjalankan mediasi konflik serta menganalisis kebijakan Rusia sebagai pihak ketiga dalam sengketa wilayah Nagorno-Karabakh.

1.7 Argumen Sementara

Pada penelitian ini, argumen sementara mengenai pemerintah Rusia dalam melaksanakan mediasi pasca konflik Azerbaijan-Armenia tahun 2008 – 2020 yaitu pertama, Rusia memilih menggunakan mediasi fasilitatif daripada menggunakan mediasi direktif yang bersifat mengintervensi agar menjaga netralitas Rusia itu sendiri serta Rusia tidak ingin mencampuri keputusan dari hasil mediasi. Kedua, netralitas Rusia akan berpengaruh terhadap kestabilan di kawasan Kaukasus dan hubungan dengan Armenia atau Azerbaijan. Ketiga, kestabilan ekonomi – politik kawasan Rusia adalah motivasi Rusia sebagai mediator konflik. Keempat, Rusia ingin menuunjukkan peran dan pengaruhnya sebagai negara *Super Power* di kawasan, dengan selalu terlibat dalam proses mediasi terutama mediasi Armenia-Azerbaijan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini bersifat kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan lebih menggunakan landasan teori sebagai analisis dalam melihat sebuah studi kasus. Dalam mencari dan mengumpulkan data tidak ada yang dilebih-lebihkan dan di kurang-kurangkan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan hal yang terkait dengan topik penelitian contohnya adalah individu, kelompok, organisasi, dan negara. Pada penelitian ini penulis menjadikan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Nagorno-Karabakh, baik aktor utama maupun pihak ketiga sebagai subjek penelitian, yaitu termasuk Armenia, Azerbaijan, dan Rusia. Selain itu juga terdapat objek penelitian dalam penulisan ini yaitu kebijakan Rusia dalam menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh, peran dan kepentingan Rusia dalam Konflik sengketa wilayah Nagorno-Karabakh, serta strategi mediasi Rusia sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik wilayah Nagorno-Karabakh.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan aktivitas pengumpulan data oleh peneliti dengan mengumpulkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikategorikan dengan cara studi dokumen, dimana melakukan pencarian data menggunakan sumber-sumber seperti jurnal, buku, dan media informasi seperti berita yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian dalam skripsi ini yang pertama adalah melakukan perbandingan mengenai topik yang akan diteliti. Kemudian proses selanjutnya adalah melakukan penulisan kerangka penelitian. Selanjutnya adalah mencari data dari berbagai jurnal, buku, dan berita yang terkait dengan studi kasus permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian melakukan analisa permasalahan kasus dengan menggunakan landasan teori yang dapat menjelaskan fenomena permasalahan dalam penelitian ini. Dan yang terakhir adalah membuat pernyataan atau kesimpulan atau hasil penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penulis melakukan penelitian dengan membagi rencana pembahasan ke dalam 4 bab sistematika pembahasan meliputi ;

Bab 1 membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 berisikan pembahasan yang meliputi konflik Armenia dan Azerbaijan dalam sengketa wilayah Nagorno-Karabakh, aktor yang terlibat serta perannya, dan proses perdamaian oleh Rusia.

Bab 3 menjelaskan pemikiran Jacob Bercovitch mengenai mediasi internasional serta mengkorelasikan pemikiran tersebut dengan mediasi yang dilakukan oleh Rusia pasca konflik wilayah Nagorno-Karabakh.

Bab 4 berisikan kesimpulan dari penelitian ini serta saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas seputar peran Rusia sebagai mediator konflik di wilayah Nagorno-Karabakh.

BAB 2

KONFLIK WILAYAH NAGORNO-KARABAKH OLEH ARMENIA DAN AZERBAIJAN

2.1 Konflik Armenia-Azerbaijan

Konflik antara Armenia-Azerbaijan dipicu oleh kekerasan kelompok etnis antara masyarakat Armenia dan Azerbaijan. Salah satu pemicu utama konflik ini adalah *irredentisme*, yaitu pembentukan suatu negara yang harus berdasarkan pada hubungan etnis (suku bangsa), budaya, sejarah, geografis, serta pengambilalihan wilayah yang dikuasai oleh negara lain. *Irredentisme* juga dapat diartikan sebagai sebuah gagasan gerakan politik yang bertujuan untuk menggabungkan daerah suatu suku bangsa dengan daerah lainnya. Nagorno-Karabakh merupakan wilayah berukuran kecil yang berada di Pegunungan Kaukasus. Wilayah tersebut termasuk bagian dari “*oblast*” otonom Republik Sosialis Soviet Azerbaijan yang ditetapkan langsung oleh Stalin pada tahun 1921.

Selama tiga puluh tahun terakhir, pertikaian antara Armenia-Azerbaijan di daerah Nagorno-Karabakh menjadi aspek penting yang memengaruhi peta politik Kaukasus Selatan serta nasib penduduk Armenia dan Azerbaijan yang tinggal di wilayah itu. Pada bulan Februari tahun 1988, konflik antara Armenia dan Azerbaijan di kawasan Nagorno-Karabakh dimulai dengan pergerakan Masyarakat Armenia di wilayah tersebut untuk menentukan nasib mereka sendiri. Pada sebagian besar penduduknya terdiri dari etnis Armenia, sementara Nagorno-Karabakh mengajukan permohonan kepada pemerintah Soviet agar wilayahnya digabungkan dengan Republik Sosialis Soviet Armenia pada tahun 1988. Permohonan oleh sebagian besar masyarakat Nagorno-Karabakh tersebut ditolak

sehingga menimbulkan konflik dan kekerasan antara pihak Azerbaijan dan Armenia, baik di wilayah Nagorno-Karabakh maupun di luar wilayah tersebut. Konflik ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa di kedua belah pihak, ratusan ribu orang dideportasi, Masyarakat kehilangan tempat tinggal dan harta benda, serta memaksa puluhan hingga ratusan ribu warga sipil untuk mengungsi.

Ketegangan meningkat saat pihak-pihak yang terlibat berusaha menemukan alasan dari berbagai sumber sejarah, politik, serta hukum untuk memperkuat tujuan masing-masing serta membenarkan Tindakan politik yang diambil (Minasyan 2010). Pada saat yang bersamaan, masyarakat dan elit Armenia, Azerbaijan, serta Nagorno-Karabakh saling menyalahkan satu sama lain atas dampak kerusakan dan kerugian akibat konflik yang terjadi. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat dan elit dari pihak yang terlibat konflik tidak menunjukkan kesiapan untuk menerima kesepakatan damai.

Runtuhnya pemerintahan Soviet di tahun 1991, menjadi sebab munculnya konflik Nagorno-Karabakh yang menjadi semakin kompleks. Runtuhnya pemerintahan Soviet membuat wilayah-wilayah Uni Soviet memisahkan dan memerdekakan diri termasuk Armenia dan Azerbaijan, sementara wilayah sengketa Nagorno-Karabakh seakan menjadi perbatasan internasional di antara kedua negara tersebut. Secara *de facto*, wilayah sengketa Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari Azerbaijan yang telah diakui oleh internasional dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Sementara itu secara *de jure*, wilayah sengketa Nagorno-Karabakh merupakan wilayah tersebut merupakan bagian dari Armenia.

Meskipun wilayah Nagorno-Karabakh diakui secara *de facto*, akan tetapi wilayah perbatasannya tidak berdemokrasi dan militer Armenia maupun militer

Azerbaijan keduanya saling menduduki di wilayah tersebut. Dikutip dari laporan *International Crisis Group* tahun 2020, “Terdapat kurang lebih 150.000 orang yang menempati wilayah di sekitar garis terdepan dengan 26 desa di sisi Armenia dan 84 desa di sisi Azerbaijan dalam jarak 10 km dari perbatasan kedua negara”.

Pada tahun 1994, Armenia dan Azerbaijan bersepakat untuk melakukan gencata senjata sebagai usaha untuk meredam konflik yang telah memanas sejak tahun 1980-an hingga 1993. Walaupun kesepakatan untuk gencatan senjata telah disepakati, ketegangan dan konflik dengan skala kecil antara pihak militer Armenia dan Azerbaijan tetap tak dapat di hindari yang kemudian berlanjut selama bertahun-tahun, hingga mengakibatkan eskalasi konflik yang memuncak di tahun 2014, 2016 dan 2020.

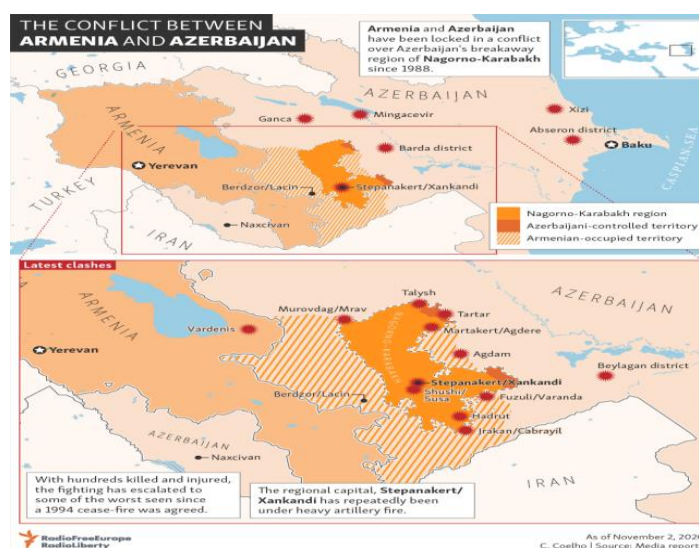
Eskalasi konflik wilayah Nagorno-Karabakh di tahun 2014 terjadi dibulan Januari. Konflik tersebut merupakan bentrokan antara militer Armenia dengan Azerbaijan di sekitar wilayah Nagorno-Karabakh. Insiden tersebut menyebabkan kurang lebih 20 tentara tewas dari kedua pihak. Enam bulan setelah konflik tersebut pada bulan Juli hingga Agustus, militer Armenia dan Azerbaijan kembali terlibat dalam bentrokan setelah diadakannya pertemuan dan mediasi di kota Paris terhadap pihak-pihak yang berkonflik untuk membahas perkembangan dan proses perdamaian keduanya. Bentrokan dan ketegangan tersebut menyebabkan 22 tentara tewas, 15 dari pihak Azerbaijan dan 7 dari pihak Armenia, serta mengakibatkan sebagian besar masyarakat yang terdampak konflik di wilayah tersebut melakukan emigrasi (Lis 2016).

Dua tahun setelahnya, tepatnya pada bulan April 2016, Armenia dan Azerbaijan kembali berkonflik di wilayah sengketa Nagorno-Karabakh. Pasukan

militer Armenia dan Azerbaijan saling berhadapan di sepanjang perbatasan internasional yang disengketakan di Nagorno-Karabakh. Kedua belah pihak mengerahkan tentara dan memindahkan alat utama system persenjataan (alutsista) berat ke posisi yang lebih dekat dengan perbatasan. Meskipun demikian, antara tahun 2016 dan 2018, terjadi bentrokan di sepanjang perbatasan tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil dibandingkan konfrontasi awal.

Lalu, dua tahun kemudian, ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan kembali meningkat. Menurut laporan resmi dari kedua pemerintah, skala konflik pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2016. Puncak ketegangan ini terjadi pada 27 September 2020, sebagai dampak dari perselisihan sebelumnya pada 12 Juli 2020. Konflik pada bulan Juli terjadi di sepanjang perbatasan timur laut yang diakui secara internasional dan berdaulat antara Armenia dan Azerbaijan. Berikut adalah peta yang menunjukkan zona yang menjadi medan pertempuran Armenia dan Azerbaijan selama tahun 2020:

Gambar 2: Peta Wilayah Pertempuran pihak Armenia dan Azerbaijan



Sumber: (<https://www.rferl.org/a/30864742.html>)

Berdasarkan peta diatas, area berwarna oranye menampilkan wilayah Nagorno-Karabakh yang secara *de facto* diakui secara internasional. Selanjutnya,

area yang diarsir melambangkan wilayah Nagorno-Karabakh yang diklaim dan diduduki oleh Armenia. Sementara itu, wilayah berwarna oranye gelap pada peta menunjukkan bagian Nagorno-Karabakh yang sudah dikuasai oleh Azerbaijan. Sementara itu, titik-titik merah pada peta menandai lokasi desa dan kota yang sebelumnya menjadi medan pertempuran sengit antara Armenia dan Azerbaijan dalam memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh.

Selanjutnya, peta di atas juga menampilkan ibu kota Nagorno-Karabakh, yaitu Stepanakert/Khankendi. Area ini menjadi zona pertempuran di mana kedua belah pihak yang berkonflik menggunakan artileri berat. Selain itu, titik hitam pada peta menandai wilayah-wilayah yang menjadi lokasi bentrokan antara Armenia dan Azerbaijan pada bulan Juli sebelumnya.

Ketegangan konflik yang meningkat disebabkan oleh perbedaan antara pihak-pihak yang berselisih. Posisi, kebutuhan, kepentingan, dan ideologi yang berbeda menjadi pemicu utama timbulnya konflik ini. Ketidaksepahaman antara Armenia dan Azerbaijan sudah terlihat sejak era Uni Soviet menguasai dan mengendalikan wilayah Nagorno-Karabakh. Di bawah kendali Uni Soviet, masyarakat Nagorno-Karabakh yang terdiri dari etnis Azeri dan Armenia merasakan adanya perbedaan dan ketidakadilan dalam pembangunan ekonomi serta diperlakukan secara tidak setara. Bagi kedua belah pihak, yaitu masyarakat Armenia dan Azerbaijan, Nagorno-Karabakh adalah fondasi identitas nasional mereka. Masyarakat Azerbaijan menganggap wilayah Karabakh sebagai tempat leluhur mereka pertama kali menetap. Sementara itu, masyarakat Armenia meyakini bahwa, secara historis, wilayah tersebut telah lama dihuni oleh etnis Armenia. Keyakinan Armenia ini didukung oleh keberadaan garis keturunan nenek

moyang Armenia yang hidup sejak awal periode Masehi, serta banyaknya gereja Armenia kuno yang ditemukan di sana.

Perbedaan pandangan antara Armenia dan Azerbaijan terlihat jelas dari pernyataan para pemimpin mereka saat diwawancarai oleh *London Information Network on Conflict and State*. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2010 dengan partai politik Azerbaijan di forum tersebut, terungkap bahwa Azerbaijan mempertahankan *status quo* atas Nagorno-Karabakh dengan tujuan mengisolasi wilayah itu, memperoleh pengakuan internasional atas integritas teritorialnya, dan membangun kekuatan militernya (Klever dalam Rosdiana, 2021). Di sisi lain, Armenia mempertahankan *status quo* Nagorno-Karabakh untuk menormalkan situasi dan mengembangkan wilayah tersebut secara *de facto*. Bagi Armenia, kesejahteraan penduduk etnis Armenia di Nagorno-Karabakh sangatlah penting. Dari total populasi Nagorno-Karabakh sebanyak 140.102 jiwa, 95% di antaranya adalah etnis Armenia yang sehari-hari menggunakan bahasa Armenia dan mata uang Dram Armenia (AMD) (The European Armenian Federation for Justice and Democracy 2011, The European Armenian Federation for Justice and Democracy 2011).

Faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya memicu perbedaan kepentingan antara Armenia dan Azerbaijan. Armenia menegaskan bahwa kepentingannya di Nagorno-Karabakh adalah bagian dari hak dan kedaulatannya. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa 95% dari total penduduk Nagorno-Karabakh adalah etnis Armenia, yang menggunakan bahasa dan mata uang Armenia. Selain itu, Armenia memandang serangan-serangan dari Azerbaijan di Nagorno-Karabakh di masa lalu merupakan bentuk pembersihan etnis atau genosida terhadap penduduk

etnis Armenia di wilayah tersebut. Tindakan semacam itu dianggap melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia. Di sisi lain, Azerbaijan meyakini bahwa mempertahankan *status quo* atas Nagorno-Karabakh adalah upaya untuk melindungi integritas teritorial dan kedaulatannya yang telah diakui secara internasional.

Perbedaan-perbedaan ini memicu konflik antara Armenia dan Azerbaijan terkait wilayah Nagorno-Karabakh. Pada 5 Agustus 2019, Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, secara terbuka menyerukan penyatuan Armenia dan Karabakh, dengan menyatakan bahwa "Karabakh adalah Armenia." Pashinyan sering memimpin kerumunan dengan nyanyian "mitsum" atau "unifikasi," sebuah slogan nasionalis yang digunakan etnis Armenia dalam perjuangan mereka untuk membebaskan Nagorno-Karabakh dari kendali Azerbaijan (Kucera 2019). Seruan Pashinyan ini mengisyaratkan konfrontasi langsung terhadap Azerbaijan. Pernyataannya juga mencerminkan harapan Armenia untuk memperkuat posisi dan otoritas Stepanakert, agar dapat diikutsertakan dalam forum negosiasi sebagai pihak ketiga, bersama Armenia dan Azerbaijan, mengenai status Nagorno-Karabakh. Langkah ini dipercaya akan mempermudah Armenia dalam melobi Stepanakert untuk bersatu dengannya.

Pernyataan Nikol Pashinyan ditanggapi oleh Ilham Aliyev pada tahun yang sama saat berpidato di Klub Diskusi Valdai. Aliyev menegaskan, "Karabakh adalah Azerbaijan" (Huseynov 2020), sebuah sikap yang memperkuat klaim Azerbaijan atas kedaulatan *de jure* wilayah Nagorno-Karabakh. Pertentangan antara kedua pemimpin ini meningkatkan tensi konflik Armenia dan Azerbaijan, yang akhirnya memicu kekerasan dan berujung pada perang terbuka. Perselisihan tersebut

mencapai puncaknya pada pertengahan Juli 2020, ketika kedua negara terlibat dalam baku tembak intens.

Kemudian, pada tanggal 12 hingga 16 Juli 2020, Armenia dan Azerbaijan bentrok di sepanjang perbatasan kedua negara, sekitar 185 mil di sebelah utara wilayah Nagorno-Karabakh (Rosdiana 2021). Bentrokan ini berawal ketika militer Azerbaijan sengaja melintasi perbatasan Armenia di sepanjang Tavush menggunakan kendaraan militer. Setelah kejadian tersebut, Armenia memberikan peringatan pada militer Azerbaijan yang kemudian membuat mereka mundur ke posisi semula. Akan tetapi, militer Azerbaijan kembali melancarkan serangan balasan dengan menembakkan artileri berat ke posisi militer Armenia dari sepanjang perbatasan Azerbaijan (Times, 2020).

Pada 17 Juli 2020, konflik semakin intensif dengan penggunaan tank, artileri, bahkan serangan drone. Pasukan militer Azerbaijan tidak hanya menargetkan tentara Armenia, tetapi juga menyerang pemukiman sipil di sekitarnya. Desa Movses, Chinari, Aygepar, Karmir Aghbiur, dan Kota Berd menjadi sasaran utama serangan militer Azerbaijan. Akibat dari serangan ini, diperkirakan lebih dari 10.000 orang menjadi korban, baik yang tewas, terluka, maupun kehilangan tempat tinggal (The Statistical Committee of the Republic of Armenia 2020).

Konflik yang memanas ini memicu diskusi serius tentang kemungkinan perang besar terbuka di Azerbaijan, sementara di Armenia, muncul perlawanan yang kuat. Di Azerbaijan, puluhan ribu demonstran menuntut agar pemerintah memberikan respons yang lebih tegas terhadap insiden-insiden pada 12, 16, dan 17 Juli 2020. Sementara itu, di Armenia, Perdana Menteri Nikol Pashinyan

menyerukan penguatan "sistem keamanan bersama" antara Armenia dan komunitas pro-Armenia di Nagorno-Karabakh. Ia menyatakan bahwa jika penguatan ini terwujud, maka akan menjadi mustahil bagi militer Azerbaijan untuk mengalahkan militer Armenia (Rosdiana 2021).

Pasca konflik yang terjadi pada 12, 16, dan 17 Juli 2020, ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan tidak kunjung mereda. Para pejabat Azerbaijan mengkritik penerbangan militer Rusia ke Armenia yang diduga bahwa penerbangan tersebut digunakan untuk mendistribusikan senjata kepada militer Armenia. Namun, pihak berwenang Rusia membantah tuduhan ini dan mereka menyatakan bahwa pesawat tersebut hanya membawa peralatan konstruksi yang dibutuhkan untuk pembangunan pangkalan militer Rusia di Armenia (Weise, Cienski and Herszenhorn 2020).

Menteri Luar Negeri Rusia memberikan respons yang justru cenderung memprovokasi, dengan menuduh Yerevan, ibu kota Armenia, sebagai penyebab bentrokan perbatasan dengan Azerbaijan. Menurutnya, faktor geografis menjadi penyebab keputusan Armenia untuk mengaktifkan kembali pos pemeriksaan perbatasan yang memicu kekhawatiran pihak lain, serta konflik Nagorno-Karabakh menjadi akar masalah bentrokan tersebut (Velizade dalam Rosdiana 2021). Satu bulan kemudian, militer Azerbaijan mengadakan latihan berskala besar bersama militer Turki, yang dimana Turki sebelumnya telah menyatakan dukungannya kepada Azerbaijan dalam konflik di bulan Juli lalu dengan Armenia. Dalam sembilan bulan pertama tahun 2020, Turki dilaporkan telah menjual peralatan militer senilai lebih dari 120 juta dolar AS kepada Azerbaijan (Brown dalam Rosdiana 2021).

Pada 25 Agustus, Armenia menerapkan kebijakan pemukiman ilegal dengan menyediakan tempat tinggal bagi sekitar 150 keluarga etnis Armenia yang terdampak ledakan Beirut di Stepanakert. Azerbaijan segera mengutuk kebijakan pemukiman ilegal ini. Azerbaijan memberikan tanggapan dengan merilis citra satelit publik yang menunjukkan bangunan-bangunan baru di salah satu wilayah yang berdekatan, serta mengancam akan melaporkan Armenia ke organisasi internasional. Situasi ini semakin memanas dengan ribuan masyarakat Azerbaijan berdemonstrasi untuk mendesak pemerintah agar memerangi Armenia. Pada saat yang bersamaan, Turki meningkatkan retorikanya dengan mendukung Baku dan menyatakan bahwa Armenia adalah ancaman terbesar terhadap perdamaian (Weise, Cienski and Herszenhorn 2020).

Selanjutnya, munculnya provokasi dari menteri luar negeri Rusia, ditambah dukungan militer penuh dari Turki untuk Azerbaijan yang meningkatkan intensitas konflik antara Armenia dan Azerbaijan. Akibatnya, pada 27 September 2020, terjadi tindak kekerasan dan perang yang cukup intensif.

Peristiwa tersebut berlanjut pada eskalasi yang kemudian berada di puncaknya pada tanggal 27 September 2020. Dari bukti adanya rekaman media, dilaporkan pasukan Azerbaijan menyerang pasukan Armenia di beberapa lokasi yang dianggap strategis pada sepanjang 200 km garis depan dengan menggunakan tank, helikopter, dan drone. Armenia dan kepemimpinan *de facto* Nagorno-Karabakh segera merespons serangan Azerbaijan dengan mengerahkan tank, kendaraan tempur, dan memobilisasi pasukan cadangan. Sejak pecahnya perang terbuka pada 27 September 2020, kedua belah pihak, baik Armenia maupun

Azerbaijan, telah melaporkan puluhan korban jiwa, meliputi warga sipil dan personel militer (International Crisis Group 2020).

2.2 Aktor-Aktor dalam Konflik Nagorno-Karabakh

Pada sebuah konflik berskala besar, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Konflik Nagorno-Karabakh mengklasifikasikan aktor-aktor ini menjadi dua kategori utama, yaitu aktor primer dan aktor sekunder. Aktor primer merupakan negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik tersebut seperti, Armenia, Azerbaijan, dan Nagorno-Karabakh. Sementara itu, aktor sekunder adalah pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut, tetapi mendukung salah satu pihak yang berkonflik. Pada kasus ini, Rusia, Turki, dan Iran menjadi aktor sekunder karena tidak terlibat secara langsung dalam konflik Nagorno-Karabakh tersebut. Turki mendukung secara resmi kepada pihak Azerbaijan dengan berbagai bentuk dukungan termasuk bantuan dana dan persenjataan. Sementara itu Iran lebih mendukung pihak Armenia secara resmi. Rusia mendukung kedua pihak dengan menyuplai persenjataan dan dukungan secara resmi (Centre 2018).

Dalam konflik Nagorno-Karabakh, Armenia dan Azerbaijan, sebagai aktor utama, memiliki kepentingan yang berbeda. Armenia berupaya melindungi etnis Armenia yang bermukim di wilayah Nagorno-Karabakh. Di sisi lain, Azerbaijan ingin mempertahankan Nagorno-Karabakh sebagai bagian dari wilayahnya, yang secara resmi diakui oleh hukum internasional.

Selain aktor utama, konflik ini juga melibatkan peran Rusia, Turki, dan Iran. Rusia mendukung Armenia dan Azerbaijan, terutama karena kepentingannya dalam penjualan persenjataan. Meskipun demikian, Rusia sempat lebih berpihak pada Armenia. Hal ini karena Rusia memiliki pangkalan militer di Gyumri, Armenia,

yang berjarak 120 km utara ibu kota Yerevan. Selain itu, Rusia dan Armenia adalah anggota *Collective Security Treaty Organization (CSTO)*, sebuah aliansi negara-negara pecahan Uni Soviet yang dipelopori oleh Rusia dan sering dianggap sebagai tandingan NATO. Perjanjian CSTO mewajibkan anggotanya untuk saling membantu jika salah satu anggotanya diserang. Namun, dalam kasus ini, Rusia tidak dapat memberikan bantuan militer langsung kepada Armenia di Nagorno-Karabakh. Berdasarkan hukum dan perjanjian internasional, wilayah Nagorno-Karabakh secara resmi merupakan bagian dari Azerbaijan. Oleh karena itu, Rusia memilih untuk berperan sebagai penengah dan penjaga perdamaian bersama Turki.

Sebagai negara yang memiliki pengaruh geopolitik yang cukup kuat di kawasan ini, dan merupakan rival Rusia dan Iran serta sekutu Azerbaijan, Turki telah membuktikan kemampuannya untuk menunda resolusi konflik. Turki mengambil keuntungan dari kekosongan kekuasaan segera setelah runtuhnya Uni Soviet untuk mendapatkan pengaruhnya di Kaukasus Selatan melalui Azerbaijan. Dengan adanya aliansi ini, yang seolah-olah ingin menyatukan kembali saudara-saudara Turki, hal tersebut merupakan salah satu upaya Turki untuk menunjukkan kembali kekuatan Turki di mata negara-negara barat sebagai pesaing dalam politik global dan penghubung ke wilayah Asia Tengah. Turki juga bertekad untuk menjadi pemangku kepentingan dalam pasar energi yang sedang berkembang (Croissant 1998).

Sementara itu, Iran memberikan dukungannya kepada Armenia yang dimana hal tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan Iran untuk menandingi pengaruh Turki baik di wilayah perbatasan maupun di Suriah. Iran memberikan dukungannya dalam bentuk dukungan militer.

Posisi Iran dalam perselisihan Nagorno-Karabakh lebih didasarkan pada kekuatan regional dan pengendalian atas pengaruh Barat dibandingkan dukungan tanpa syarat dari salah satu pihak dalam konflik tersebut. Republik Islam Iran memelihara hubungan yang nyaman dalam mendukung Armenia namun tidak sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Azerbaijan. Dengan adanya kerja sama antara Iran dan Armenia, salah satu keuntungan yang diperoleh pihak Armenia adalah mendapatkan sumber daya penting dari Iran sebagai imbalan atas upaya mempertahankan hambatan terhadap hegemoni Barat (Mayer 2013).

Hubungan erat antara Armenia dan Iran telah membawa peluang perdagangan serta keragaman sumber daya energi sekaligus membatasi pengaruh Turki di kawasan dan menyeimbangkan aliansi Turki-Azerbaijan. Pada tahun 2011, Armenia menerima sebanyak 14,1 miliar kubik gas dari Iran, dan rencana untuk memperluas impor ini dapat mengurangi ketergantungan energi dari gas Rusia yang didistribusikan melalui Georgia. Perdagangan antara Iran dan Armenia saat ini berjumlah sekitar 500 juta US Dollar, namun dengan adanya penguatan hubungan membuat Teheran berharap bahwa jumlah ini akan tumbuh secara substansial, bahkan dua kali lipat, dalam waktu dekat (Croissant 1998).

2.3 Upaya Perdamaian oleh Rusia

Dalam upaya penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh, Rusia berperan sebagai salah satu anggota co-chairman OSCE Minsk Group, yang bertindak sebagai mediator. Tujuan Minsk Group adalah menyediakan forum negosiasi regular serta kerangka kerja yang sesuai untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai (Suleymanly 2012). Sejak gencatan senjata dimulai pada tahun 1994, negosiasi terkait konflik Nagorno-Karabakh Sebagian besar dilakukan oleh

Armenia dan Azerbaijan. Mereka mendapatkan dukungan bergantian dari anggota Minsk Group lainnya, dengan Rusia memainkan peran paling aktif sebagai mediator (Kristiani 2013).

Para pengamat dari Yerevan, Baku, Washington hingga Brussels justru berpendapat bahwa Rusia tidak terlalu serius dalam menjalani perannya sebagai mediator konflik Nagorno-Karabakh. Keraguan ini muncul karena Rusia juga berperan sebagai pemasok persenjataan bagi Armenia dan Azerbaijan, serta memiliki berbagai kerja sama di sektor pertahanan dan ekonomi dengan Armenia. Namun, Rusia sendiri mendukung status quo untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan Kaukasus Selatan dan menjaga stabilitas di berbagai sektor di sana. Rusia juga berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan Nagorno-Karabakh. Persepsi negatif terhadap peran Rusia tidak hanya didasarkan pada kepentingan geopolitiknya, tetapi juga akibat perang Rusia-Georgia pada tahun 2008 (A. Shirinyan 2013). Meskipun demikian, perang tersebut juga memunculkan harapan baru mengenai peran Rusia sebagai mediator dalam konflik Nagorno-Karabakh. Ini mengingat kebutuhan Rusia untuk memperbaiki citranya yang menurun di kancah internasional setelah konflik dengan Georgia. Harapan ini semakin diperkuat dengan terciptanya Deklarasi Moskow 2008, yang ditandatangani dalam pertemuan trilateral antara Presiden Armenia, Azerbaijan, dan Rusia di Moskow (Pashayeva 2009).

Hubungan antara Armenia dan Azerbaijan mengalami pasang surut, terutama karena hilangnya kepercayaan di antara keduanya (Nalbandian 2011). Rusia, melalui Medvedev dan Lavrov, menyadari pentingnya memperbaiki hubungan ini dan menyatakan upayanya untuk mendekatkan kedua negara. Namun,

menciptakan suasana dan konteks positif dalam hubungan ini bukanlah hal yang mudah, terutama bagi Rusia yang memiliki peran signifikan dalam geopolitik Kaukasus Selatan.

Pernyataan Duta Besar Rusia untuk Azerbaijan, Vladimir Dorokhin, dalam konferensi pers pada 8 Juni 2011, menegaskan keseriusan Rusia sebagai mediator. Ia menyatakan bahwa Rusia telah berusaha sebaik mungkin dan akan memanfaatkan setiap peluang untuk mencapai kesepakatan yang signifikan. Meskipun terkadang hasil negosiasi mengecewakan, Dorokhin menekankan bahwa selalu ada harapan (Dementyeva 2011). Selain itu, dalam wawancara dengan stasiun radio “Voice of Russia” pada 8 Agustus 2012, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Grigory Karasin, menyatakan bahwa Armenia dan Azerbaijan adalah mitra dekat dalam CIS dan Rusia menghargai hubungan dengan keduanya. Ia menambahkan bahwa Rusia akan berusaha keras untuk mendekatkan posisi kedua negara dalam konflik Nagorno-Karabakh (Trend 2012). Ini menunjukkan upaya Rusia untuk menumbuhkan harapan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Meskipun situasi tetap tegang, Rusia berargumen bahwa proses negosiasi akan terus berjalan dan selalu ada kemajuan di setiap tahapnya.

Peran Rusia dalam memfasilitasi negosiasi antara Armenia dan Azerbaijan sangatlah signifikan. Rusia adalah mediator paling aktif pada tahun 2010 dan 2011 (Tariverdiev 2011). Dari sepuluh konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh Co-chairman OSCE Minsk Group, Rusia menjadi fasilitator dalam delapan pertemuan, yang berlangsung pada tanggal 2 November di Moskow, 4 Juni 2009 di St. Petersburg, 18 Juli 2009 di Moskow, 25 Januari 2010 di Sochi, 17 Juni 2010 di St.

Petersburg, 27 Oktober 2010 di Astrakhan, 5 Maret 2011 di Sochi, 24 Juni 2011 di Kazan, dan 23 Januari 2012 di Sochi.

Setelah Deklarasi Moskow dikeluarkan pada 2 November 2008, pertemuan trilateral pertama difasilitasi oleh Rusia di St. Petersburg pada 4 Juni 2009. Meskipun ketiga presiden tidak mengeluarkan pernyataan publik, Menteri Luar Negeri kedua negara menyatakan bahwa suasana pertemuan tersebut konstruktif (Babayan 2009). Presiden Armenia dan Azerbaijan kembali bertemu di Moskow pada 18 Juli 2009 untuk membahas penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh. Dalam pertemuan yang dimediasi oleh Dmitry Medvedev, terjadi diskusi yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar penyelesaian konflik yang telah disusun oleh ketiga co-chairman OSCE Minsk Group (Anonim 2009). Pertemuan pertama Sargsyan dan Aliyev di tahun 2010 berlangsung pada 25 Januari di Sochi, diinisiasi dan dipimpin oleh Dmitry Medvedev. Tidak ada keterangan lebih lanjut dari ketiga presiden atau dokumen yang dirilis setelah pertemuan ini. Namun, Lavrov menjelaskan bahwa pertemuan di Sochi menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan ketidaksetujuan (Kristiani 2013). Pada 17 Juni 2010, Sargsyan dan Aliyev bertemu di Istana Konstantinov, Saint Petersburg, atas undangan Medvedev (Galushko 2010). Berdasarkan wawancara dengan juru bicara Menteri Luar Negeri Azerbaijan dan Menteri Luar Negeri Armenia, media melaporkan bahwa Armenia dan Azerbaijan sepakat untuk melanjutkan proses negosiasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang ada (Minasyan 2010).

Negosiasi antara Armenia dan Azerbaijan yang dimediasi oleh Rusia berlanjut dengan pertemuan trilateral tanpa delegasi di Astrakhan, Rusia, pada 27 Oktober 2010. Fokus utama diskusi adalah perhatian terhadap aspek kemanusiaan,

yang dianggap penting dalam menyelesaikan konflik yang berlangsung antara Armenia dan Azerbaijan. Medvedev mengangkat isu mengenai rezim gencatan senjata dan penguatan *Confidence Building Measures* (CBM) (Higgins n.d.). Presiden Armenia dan Azerbaijan sepakat bahwa langkah awal untuk memperkuat CBM adalah dengan menukar tawanan perang dan mengembalikan jenazah para prajurit yang tewas. Menurut Medvedev, meskipun pertukaran tawanan perang tergolong isu "kecil," hal ini sangat vital karena menjadi langkah awal yang baik untuk mencapai kesepakatan. Setelah pertemuan trilateral, dalam konferensi pers, Medvedev mengakui adanya masalah yang belum terselesaikan, tetapi tetap mengimbau semua pihak untuk optimis terhadap pencapaian solusi dalam proses negosiasi. Hasil dari pertemuan 27 Oktober 2010 di Astrakhan tidak hanya berupa diskusi. Armenia mengirim jenazah tentara Azerbaijan, Mubariz Ibrahimov dan Farid Ahmadov, pada 6 November 2010, sementara Azerbaijan mengembalikan jenazah warga negara Armenia.

Pertemuan trilateral di Sochi pada 5 Maret 2011 merupakan pertemuan pertama di tahun tersebut. Ketiga presiden mengeluarkan pernyataan bersama mengenai penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh, menyatakan bahwa mereka membahas isu-isu praktis untuk mengimplementasikan kesepakatan yang dicapai pada pertemuan sebelumnya di Astrakhan, terutama mengenai pertukaran tawanan perang secepat mungkin. Mereka juga menegaskan kembali komitmen untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan menyelidiki peristiwa-peristiwa di sepanjang garis gencatan senjata. Pada 24 Juni 2011, diadakan KTT di Kazan tetapi tidak ada kesepakatan yang dicapai mengenai isu-isu yang tercakup dalam prinsip-prinsip dasar. Meskipun Medvedev dilaporkan merasa frustrasi dengan hasil diskusi

di Kazan, ia mengutus Lavrov untuk mengunjungi Armenia dan Azerbaijan pada 8 Juli 2011 dengan membawa proposal penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh. Selain itu, Medvedev menitipkan pesan kepada Lavrov untuk disampaikan kepada Presiden Armenia dan Azerbaijan, menegaskan kesungguhannya untuk mencapai kesuksesan dalam proses penyelesaian konflik dan menyatakan bahwa kondisi sudah ada untuk mencapai kesepakatan. Dalam hal ini, Rusia menunjukkan respons yang cepat terhadap situasi yang memerlukan inisiatif untuk mengatasi kebuntuan (Kristiani 2013).

Konferensi tingkat tinggi kesepuluh dengan format trilateral mengenai penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh berlangsung pada 23 Januari 2012 di Sochi atas inisiatif Medvedev. Dalam pertemuan ini, ketiga presiden sepakat mengenai pentingnya upaya berkelanjutan untuk menyusun kesepakatan perdamaian. Pertemuan di Sochi juga menghasilkan rencana untuk mengembangkan kontak kemanusiaan antara Armenia dan Azerbaijan sebagai bagian dari Confidence Building Measures (CBM), dengan memfasilitasi dialog antara para intelijen, akademisi, dan organisasi masyarakat. Ini merupakan pertemuan terakhir antara Armenia dan Azerbaijan yang difasilitasi oleh Rusia.

Upaya Rusia sebagai mediator mendapatkan apresiasi dari Armenia dan Azerbaijan. Setelah pertemuan pada 18 Juli 2009 di Moskow, Sargsyan menyatakan bahwa diskusi dalam rangka negosiasi telah mencapai kemajuan, sementara Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Elmar Mammadyarov, menilai pembicaraan di Moskow telah memberikan harapan baru untuk penyelesaian konflik. Mammadyarov juga memuji komitmen Medvedev untuk mendalami masalah demi mencapai solusi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, Elkan

Polukhov, juga mengapresiasi peran Rusia, menyatakan bahwa "Kami percaya bahwa setiap pertemuan di tingkat presiden, terutama dengan partisipasi pemimpin Rusia, sangat penting dalam mencari solusi untuk konflik Nagorno-Karabakh." Pada 17 November 2010, dalam kunjungannya ke Moskow, Sargsyan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas upaya Rusia sebagai mediator, menyatakan bahwa Rusia selalu memainkan peran positif di Kaukasus. Wakil Perdana Menteri Azerbaijan, Yagub Eyyubov, juga menyatakan pada 18 Maret 2011, setelah pertemuan komisi kerja sama ekonomi antara Azerbaijan dan Rusia, bahwa Azerbaijan menghargai peran Rusia dalam menghasilkan kemajuan dalam proses regulasi. Selain itu, Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, juga mengucapkan terima kasih atas upaya mediasi Medvedev selama ini. Dengan nada serupa, pada 28 Oktober 2011, Menteri Luar Negeri Armenia menyampaikan rasa terima kasihnya atas upaya Rusia sebagai mediator, "Kami sangat berterima kasih atas upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Presiden Dmitry Medvedev."

Pada tahun 2015, militer Armenia dan Azerbaijan kembali terlibat konfrontasi yang melibatkan penembakan dan pengeboman dengan mortar serta granat di daerah Agdam, yang mengakibatkan tewasnya dua tentara Armenia dan tiga tentara Azerbaijan (Herszenhorn 2015). Selain itu, terjadi berbagai insiden konflik di perbatasan antara Nagorno Karabakh, Armenia, dan Azerbaijan yang tidak dipublikasikan secara detail kepada publik. Akhirnya, konflik ini berujung pada perang terbuka yang berlangsung selama empat hari dari 2 hingga 5 April 2016, mirip dengan situasi pada tahun 1994. Dalam perang terbuka ini, Azerbaijan berhasil merebut wilayah Lele Tepe, yang terletak sekitar 3 mil di utara perbatasan

Iran dan dekat dengan sungai Araxes, yang memiliki arti strategis bagi Azerbaijan dalam eskalasi konflik di masa depan (de Waal 2016).

Situasi ini disebabkan oleh stabilitas konflik yang relatif serta ketidakmampuan para inisiator perdamaian internasional untuk mempertahankan perdamaian secara berkelanjutan. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki kemampuan untuk mengelola kondisi di zona konflik dengan fleksibel. Pemanfaatan potensi militer kedua negara berperan penting dalam menentukan pihak yang mampu sepenuhnya mengontrol keadaan tersebut (Mikaelian 2017).

Kondisi politik dan karakter partai-partai di kedua negara berperan dalam proses negosiasi perdamaian yang berlangsung, dan ini termasuk dalam perspektif *Nature of Parties* pada tahap kondisi antecedent. Partai *Yeni Azerbaijan Partiyasi* (YAP), yang berkuasa di Azerbaijan, menegaskan penolakannya untuk memberikan Nagorno-Karabakh hak untuk merdeka (Samedzade 2017). Sebaliknya, Azerbaijan bersedia memberikan Nagorno-Karabakh tingkat otonomi tertinggi sebagai bagian dari wilayahnya (Rashidoghlu 2016). Sementara itu, di Armenia, partai yang berkuasa, *Hayastani Komunistakan Kusaksutyun* (HKK), menyatakan komitmennya untuk terlibat sepenuhnya dalam negosiasi perdamaian sebagai wakil Republik Artsakh. HKK bertujuan untuk memperjuangkan status Nagorno-Karabakh agar bisa diperoleh secara legal oleh penduduk Republik Artsakh (The Republican Party of Armenia 2017).

Secara mendalam, keterlibatan Rusia sebagai mediator dalam penyelesaian konflik di Nagorno-Karabakh antara 2008 hingga 2016 tidak dapat dipisahkan dari perannya sebagai *Co-Chairs OSCE Minsk Group*. Format *OSCE Minsk Group* terus

menjadi acuan untuk mempertimbangkan dinamika geopolitik yang muncul dalam konteks konflik di Nagorno-Karabakh (A. Shirinyan 2016). Bagi Rusia, sangat penting dalam upaya penyelesaian konflik di Nagorno-Karabakh untuk memperoleh informasi yang akurat demi mendukung kelancaran dialog perdamaian antara kedua pihak yang berkonflik selama pertemuan. *Medium* yang digunakan Rusia untuk mengumpulkan informasi mengenai situasi konflik dan posisi masing-masing pihak adalah agenda pertemuan resmi *OSCE Minsk Group* dan pertemuan trilateral dengan Rusia. Dialog yang terjadi dengan pihak-pihak yang berkonflik akan memberikan wawasan kepada mediator mengenai situasi dan posisi yang terlibat, yang nantinya akan dijadikan dasar untuk merumuskan solusi penyelesaian konflik di Nagorno-Karabakh. Hal ini tercermin dalam negosiasi perdamaian yang diadakan dalam pertemuan di Wina pada 16 Mei 2016, yang membahas resolusi konflik di Nagorno-Karabakh setelah insiden perang terbuka selama empat hari pada 2-5 April 2016 (Minsk Group 2016).

Pertemuan trilateral memiliki fungsi dan esensi yang serupa dengan pertemuan resmi yang dipandu oleh *Co-Chairs OSCE Minsk Group*. Melalui pertemuan ini, Rusia bahkan dapat melakukan pengaruh yang lebih besar terhadap pihak-pihak yang berkonflik dan memiliki fleksibilitas dalam memberikan rekomendasi penyelesaian konflik. Hal ini sering menimbulkan spekulasi mengenai adanya agenda tertentu dan bersifat rahasia di balik upaya penyelesaian konflik di Nagorno-Karabakh dalam konteks pertemuan trilateral ini (Caucasus Edition 2013). Secara umum, dengan adanya pertemuan trilateral ini, Rusia dapat secara langsung memandu dan mengarahkan pihak-pihak yang berkonflik dalam proses negosiasi perdamaian tanpa banyak tekanan dari pihak lain. Dalam pertemuan ini, hanya

Presiden Rusia sebagai mediator serta Presiden Armenia dan Azerbaijan yang diizinkan berpartisipasi dalam proses negosiasi. Hal ini membuat kedua belah pihak yang berkonflik lebih terbuka untuk menjelaskan situasi konflik dan mengemukakan pandangan mereka terkait solusi yang menguntungkan semua pihak.

Sikap Rusia yang proaktif sebagai penengah konflik antara Armenia dan Azerbaijan memberikan berbagai keuntungan bagi Moskow. Keuntungan ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga meningkatkan eksistensi dan reputasi Rusia di mata dunia. Rusia berhasil memediasi konflik dengan mengadakan perundingan di Moskow. Bagi Rusia, kesepakatan gencatan senjata di Nagorno-Karabakh ini mempertegas peran utama mereka di kawasan tersebut dan memungkinkan Rusia untuk mengoptimalkan kapasitasnya sebagai perantara.

BAB 3

ANALISIS MEDIASI TERKAIT PELAKSANAAN MEDIASI OLEH RUSIA KONFLIK AZERBAIJAN-ARMENIA DI NAGORNO- KARABAKH TAHUN 2020

Dalam teori mediasi menurut Bercovitch, untuk meraih hasil mediasi yang baik dan efektif perlu mengidentifikasi persoalan konflik, aktor-aktor yang terlibat dan karakteristik mediator, yang kemudian dapat dilaksanakannya proses mediasi dengan memilih strategi mediasi yang tepat untuk mendapatkan hasil yang baik. Dalam proses tersebut Jacob Bercovitch menyebut konsep diatas sebagai konsep skema model *contingency* dimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.

CONTEXT	PROCESS	OUTCOME
<ul style="list-style-type: none">• Nature of Dispute• Nature of Parties• Nature of Mediator	Mediator Strategies	

Pertama-tama, untuk dapat mengetahui strategi yang tepat, perlu mengidentifikasi jenis konflik (*Nature of Dispute*), kemudian aktor yang terlibat (*Nature of Parties*) dan karakter dari mediator (*Nature of Mediator*). Jenis konflik (*Nature of Dispute*) dapat diidentifikasi apakah termasuk sebagai konflik teritorial, konflik agama, suku, atau etnis, konflik ideologi, konflik ekonomi, konflik politik serta konflik sumberdaya. Selain jenis konflik, dalam *Nature of Dispute* juga mengidentifikasi durasi konflik dan intensitas konflik, seperti konflik ringan, sedang atau tinggi.

Selanjutnya, setelah mengidentifikasi konteks dasar dari persoalan, dapat ditentukan strategi yang tepat untuk digunakan dalam proses mediasi. Strategi tersebut terdapat dua jenis yaitu mediasi fasilitatif, mediasi yang dimana mediator hanya memberikan fasilitas dan mengarahkan jalannya mediasi dan tidak mengintervensi atau mediasi direktif dimana pihak ketiga dapat mengintervensi proses mediasi dan mempengaruhi hasil mediasi.

Tahap akhir adalah Outcome atau hasil mediasi, dimana hasil dapat berupa gagal atau berhasilnya mediasi dari proses penerapan strategi yang tepat berdasarkan hasil identifikasi persoalan dan apakah mediasi tersebut berjalan efektif atau tidak.

3.1 Identifikasi Karakteristik Konflik Nagorno-Karabakh

Hasil dari identifikasi Nature of Dispute ditemukan bahwa karakteristik dasar pada konflik Nagorno-Karabakh meliputi jenis sengketa konflik yang tergolong kedalam jenis sengketa teritorial dan konflik etnis dimana adanya perebutan wilayah Nagorno-Karabakh oleh Armenia dan Azerbaijan. Selain jenis konflik, tingkat intensitas dan durasi konflik juga bagian dari elemen *Nature of Dispute*, serta menjadi dasar untuk menentukan strategi mediasi yang tepat untuk menemukan solusi. Tingkat intensitas konflik Nagorno-Karabakh dapat digolongkan ke dalam konflik dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi, hal ini dapat dilihat dari adanya bentrokan maupun kontak senjata hingga perang terbuka antara Armenia dan Azerbaijan dengan durasi konflik yang tergolong kedalam durasi konflik jangka panjang sejak 1990-an hingga 2020.

Selanjutnya mengenai *Nature of Parties* yang dapat diartikan juga sebagai karakteristik atau sifat dari pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik yaitu aktor

yang terlibat langsung seperti Armenia dan Azerbaijan, aktor yang tidak terlibat langsung seperti Turki yang mendukung dan memberikan bantuan di bidang militer kepada Azerbaijan, Iran yang mendukung Armenia, serta Rusia yang menjadi penyuplai utama persenjataan Armenia maupun Azerbaijan dan sekaligus menjadi mediator konflik. Secara tidak langsung konflik ini juga melibatkan negara-negara yang telah di sebutkan diatas, walaupun tidak secara langsung dan aktor utama dalam konflik ini adalah Azerbaijan dan Armenia.

Karakteristik lain dari aktor-aktor utama yang terlibat konflik juga perlu dipertimbangkan seperti, tujuan dan motivasi. Pada konflik Nagorno-Karabakh sudah jelas bahwa tujuan dan motivasi dari Armenia maupun Azerbaijan adalah mempertahankan teritorial Nagorno-Karabakh, Azerbaijan yang mempertahankan wilayah tersebut karena secara *de facto* wilayah tersebut masuk kedalam wilayah Azerbaijan, dan dilain hal Armenia mempertahankan wilayah tersebut karena mayoritas penduduk wilayah tersebut adalah etnis Armenia. Dibalik konflik perebutan wilayah Nagorno-Karabakh yang cukup serius, pihak Armenia dan Azerbaijan juga masih bersedia bernegosiasi. Hal ini menandakan intervensi pihak ketiga secara langsung kedalam konflik tidak dibutuhkan melainkan mediasi secara fasilitatif guna mengurangi intensitas konflik atau perang terbuka secara langsung.

Terakhir, terdapat *Nature of mediator* dimana Rusia sebagai mediator konflik Nagorno-Karabakh memiliki status sebagai negara *super power* atau negara yang paling berpengaruh baik politik maupun ekonomi dikawasan kaukasus, oleh karena itu Rusia ditunjuk langsung dan dipercayai untuk menjadi mediator konflik oleh Armenia dan Azerbaijan. Selain itu Rusia sebagai mediator memiliki profesionalitas tinggi dimana Rusia tetap berusaha netral walaupun Rusia menjadi

penyuplai utama persenjataan kedua negara terutama Armenia. Hal ini dikarenakan Rusia memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan wilayah yang dimana hal tersebut berpengaruh kepada kepentingan Rusia secara ekonomi maupun politik. Rusia juga ingin mendapatkan keuntungan dalam bidang politik, yang bertujuan untuk mencapai tujuan strategis *Near Abroad Russia*. Hal itu dilakukan demi menjaga dan mengkonsolidasikan kekuatan serta pengaruhnya di daerah bekas wilayah Uni Soviet. Dengan memfasilitasi mediasi Armenia-Azerbaijan pada konflik yang tengah mereka hadapi menjadi kunci utama bagi Rusia untuk melancarkan misinya dalam mencapai tujuannya

3.2. Peran & Strategi Rusia

Peran Rusia sebagai mediator konflik antara Azerbaijan dan Armenia telah berlangsung sejak awal konflik besar itu pecah pada 1994. Sebagaimana Mediasi menurut Bercovitch, Rusia telah memenuhi syarat-syarat sebagai mediator, dimana dengan sukarela Rusia menjadi mediator konflik sejak Awal konflik hingga sekarang dengan persetujuan dan ditunjuk langsung oleh Armenia-Azerbaijan. Sejak berperan aktif sebagai mediator konflik Nagorno-Karabakh, Rusia telah berkontribusi dalam banyak forum mediasi Nagorno-Karabakh yang seringkali tidak membuahkan hasil dan tidak disetujuinya resolusi konflik atau Solusi dari pihak mediator sehingga konflik antara Armenia dan Azerbaijan berlanjut. Hal tersebut sebagai mana yang telah Bercovitch katakan bahwa hasil dan Keputusan mediasi mutlak ada di tangan pihak yang berkonflik, dan pihak ketiga tidak dapat mengintervensi lebih jauh Keputusan-keputusan pihak yang berkonflik yang dimana Rusia tidak bisa mengintervensi hasil dari mediasi dan hanya berperan

sebagai mediator serta memberikan fasilitas untuk pihak kepada Armenia dan Azerbaijan untuk berdiskusi mencari solusi damai.

Mediasi menurut Jacob Bercovitch, dapat di golongkan menjadi dua cara yaitu mediasi direktif dan fasilitatif. Rusia sebagai mediator memilih menggunakan strategi mediasi fasilitatif dikarenakan penggunaan mediasi fasilitatif dinilai lebih relevan untuk persoalan konflik Nagorno-Karabakh, dimana Rusia sebagai mediator memiliki hubungan baik dengan kedua pihak yang berkonflik Armenia maupun Azerbaijan. Mediasi fasilitatif mengharuskan mediator untuk bertindak netral tidak memihak salah satu kubu yang terlibat konflik, dimana posisi Rusia yang sangat rawan jika memihak kepada salah satu kubu, dikarenakan selain menjadi mediator, Rusia juga menyuplai persenjataan kepada Armenia maupun Azerbaijan. Penggunaan mediasi fasilitatif juga sejalan dengan posisi Rusia yang tidak ingin mengintervensi lebih dalam ataupun memberikan tekanan kepada salah satu pihak yang berkonflik. Rusia dengan mediasi fasilitatifnya hanya memberikan fasilitas komunikasi antar pihak yang berkonflik dan membantu memahami kepentingan masing-masing serta Rusia hanya mengarahkan proses mediasi untuk pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan solusi permasalahan.

Strategi mediasi yang dilakukan Rusia tidak menggunakan mediasi direktif dikarenakan mediasi direktif akan menjadikan proses mediasi lebih mengintervensi dan memberikan tekanan kepada para pihak yang berkonflik. Jika Rusia menggunakan strategi mediasi direktif maka dapat mengganggu hubungan baik Rusia dengan salah satu pihak yang berkonflik bahkan berpotensi menimbulkan konflik baru.

Peran Rusia sebagai mediator dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan, khususnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan dagang dengan Armenia dan Azerbaijan, terutama dalam komoditas andalannya yaitu senjata. Dari perspektif Rusia, kerja sama paralel di bidang persenjataan dengan Azerbaijan dan Armenia dimaksudkan untuk memastikan bahwa perlombaan senjata antara kedua negara tetap berada dalam kendali. Selain itu, kerja sama paralel ini bertujuan untuk membangun citra yang bersahabat serta menegaskan pentingnya peran Rusia bagi kedua negara, guna memperkuat posisinya sebagai mediator dalam proses penyelesaian konflik di Nagorno-Karabakh.

Dalam sektor ekonomi, Armenia menjalin kerja sama dengan Rusia melalui *Uni Ekonomi Eurasia* (EEU). Kemitraan ini tidak hanya memfasilitasi perdagangan dengan Armenia, tetapi juga membuka akses pasar bagi produk-produk dari Nagorno-Karabakh (Putz, 2018). Secara faktual, Rusia merupakan pasar ekspor terbesar kedua bagi wilayah Nagorno-Karabakh setelah Armenia (Babayan S. D., 2016). Dalam tiga tahun terakhir, Nagorno-Karabakh menyumbang sekitar 3–4 persen dari total ekspornya, dengan nilai sekitar 2 juta Dolar AS (Babayan A., 2009). Selain itu, Rusia juga berperan membantu Armenia dalam pengelolaan aset-aset energinya (J. McGinnity, 2010, hal. 2–15). Selama kurun waktu 2007 hingga 2011, Rusia menyediakan sekitar 55% pasokan senjata yang diberikan kepada Azerbaijan dan 96% diberikan kepada Armenia (Paul Holtom, 2012). Terakhir, Rusia juga berkontribusi terhadap 85% dari impor senjata di Azerbaijan di tahun 2010 hingga 2014 (Ramani, 2016).

Rusia juga berharap mendapatkan keuntungan politik melalui strategi *near abroad*. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan memperkuat pengaruhnya di bekas wilayah Uni Soviet. Rusia mencapai ini dengan membuat Armenia dan Azerbaijan bergantung secara politik pada proses perdamaian yang dipimpinnya (Franco, 2018). Selain itu, Rusia memanfaatkan konflik Nagorno-Karabakh untuk mengantisipasi upaya Uni Eropa dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi Rusia (Recknagel, 2016). Rusia mendorong penutupan sementara jalur pipa gas Azerbaijan, seperti jalur Baku-Tbilisi-Ceyhan dan jalur Baku-Supsa, yang merupakan alternatif utama pasokan energi dari kawasan Kaspia. Akibatnya, negara-negara Uni Eropa kembali bergantung pada pasokan energi melalui jalur utama Rusia, yaitu via Belarusia dan Ukraina (Recknagel, 2016).

Oleh karena itu, perlunya Rusia sebagai mediator konflik untuk tetap netral dan berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan terhadap konflik Nagorno-Karabakh. Rusia dengan strategi mediasi fasilitatifnya yang mana mediator harus bersikap netral dan tidak mengintervensi proses mediasi melainkan hanya sebatas memberikan fasilitas komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik dan mengarahkan proses mediasi untuk menemukan solusi yang tepat dianggap lebih cocok dengan situasi konflik, posisi Rusia, dan permasalahan konflik Nagorno-Karabakh. Akan tetapi, penggunaan mediasi fasilitatif oleh Rusia dalam konflik Nagorno-Karabakh juga memiliki hambatan dan kekurangan dibanding jika Rusia menggunakan mediasi direktif. Akibatnya dalam proses mediasi antara Armenia dan Azerbaijan seringkali menemui titik buntu dalam menemukan solusi akibat dari tidak adanya pihak ketiga yang tegas untuk mengintervensi dalam memberikan solusi,

Rangkaian kedua terdapat kunci dari proses dari mediasi itu sendiri yaitu strategi yang di gunakan Rusia dalam melakukan mediasi konflik antara Armenia dan Azerbaijan. Dengan mengidentifikasi konteks persoalan konflik Nagorno-Karabakh, Rusia menggunakan strategi mediasi fasilitatif yang dianggap paling relevan dalam proses mediasi konflik Nagorno-Karabakh, mengingat posisi Rusia yang memiliki hubungan baik dengan Armenia dan Azerbaijan. Netralitas Rusia menjadi krusial karena Rusia juga berperan sebagai penyuplai senjata bagi kedua belah pihak, sehingga keberpihakan dapat merusak kredibilitasnya sebagai mediator dan tidak menunjukkan ciri mediasi fasilitatif. Melalui mediasi fasilitatif, Rusia tidak memberikan tekanan atau intervensi langsung, melainkan berfokus pada fasilitasi komunikasi dan pemahaman kepentingan masing-masing pihak, guna mendorong tercapainya solusi yang disepakati bersama.

Peran Rusia dalam memfasilitasi negosiasi antara Armenia dan Azerbaijan tidak dapat dipungkiri. Rusia merupakan mediator paling aktif pada tahun 2010 dan 2011 (Tariverdiev 2011). Dari sepuluh konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh *co-chairman OSCE Minsk Group*, Rusia menjadi mediator dalam delapan pertemuan, yang berlangsung pada tanggal 2 November di Moskow, 4 Juni 2009 di St. Petersburg, 18 Juli 2009 di Moskow, 25 Januari 2010 di Sochi, 17 Juni 2010 di St. Petersburg, 27 Oktober 2010 di Astrakhan, 5 Maret 2011 di Sochi, 24 Juni 2011 di Kazan, dan 23 Januari 2012 di Sochi.

Rangkaian terakhir dari skema model contingency Bercovitch adalah hasil, dimana hasil yang dimaksud adalah hasil dari identifikasi konteks persoalan dan penerapan strategi mediasi fasilitatif yang selama prosesnya menghasilkan kesepakatan atau tidak menghasilkan kesepakatan dan solusi.

Pada tanggal 2 November 2008, dikeluarkannya deklarasi Moskow dan setelahnya terjadi forum mediasi pertama yang berlangsung di St. Petersburg pada tanggal 4 Juni 2009 dan diselenggarakan oleh Rusia. Ketiga presiden yang mengikuti pertemuan tidak mengeluarkan pernyataan publik setelahnya, tetapi kedua Menteri Luar Negeri yang turut serta menyatakan bahwa suasananya konstruktif (Babayan 2009). Selanjutnya, Pada tanggal 18 Juli 2009, Presiden Armenia dan Azerbaijan kembali bertemu di Moskow untuk membahas terkait penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh yang dimediasi oleh Dmitry Medvedev selaku Presiden Rusia. Mediasi tersebut berisi diskusi yang lebih terperinci mengenai prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian konflik yang telah disusun oleh ketiga *co-chairman OSCE Minsk Group*.

Kemudian, pada tanggal 25 Januari 2010 di Sochi, Rusia, Dmitry Medvedev selaku Presiden Rusia memimpin dan menginisiasi pertemuan pertama dengan Sargsyan selaku Presiden Armenia dan Aliyev selaku Presiden Azerbaijan. Setelah pertemuan tersebut, ketiga presiden yang ikut serta tidak memberikan keterangan lebih lanjut dan tidak ada dokumen yang dirilis. Akan tetapi, Lavrov menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan ketidaksetujuan (Kristiani 2013).

Selanjutnya, pada tanggal 17 Juni 2010, Medvedev mengundang Sargsyan dan Aliyev untuk bertemu di Istana Konstantinov, Saint Petersburg (Galushko 2010). Media melaporkan bahwa Armenia dan Azerbaijan sepakat untuk melanjutkan proses negosiasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang ada (Minasyan 2010). Informasi tersebut berdasarkan dari wawancara juru bicara dengan Menteri Luar Negeri Azerbaijan dan Menteri Luar Negeri Armenia.

Setelah itu, pada tanggal 27 Oktober 2010 terjadi pertemuan trilateral tanpa delegasi yang dilaksanakan di Astrakhan yang dimana negosiasi antara Armenia dan Azerbaijan yang dimediasi oleh Medvedev masih berlanjut di pertemuan tersebut. Aspek yang menjadi fokus utama dalam diskusi adalah aspek kemanusiaan karena dianggap penting dalam menyelesaikan konflik yang berlangsung antara Armenia dan Azerbaijan. Kemudian, di dalam pertemuan tersebut, Medvedev juga mengangkat isu mengenai rezim gencatan senjata dan penguatan *Confidence Building Measures* (CBM) (Higgins n.d.). Presiden Armenia dan Azerbaijan setuju bahwa langkah awal untuk memperkuat CBM adalah dengan menukar tawanan perang dan mengembalikan jenazah para prajurit yang gugur di medan perang. Menurut Medvedev, meskipun pertukaran tawanan perang tergolong isu "kecil," hal ini sangat penting karena menjadi langkah awal yang baik untuk mencapai kesepakatan.

Dalam konferensi pers yang dilakukan setelah pertemuan trilateral, Medvedev mengakui bahwa adanya masalah yang masih belum terselesaikan. Akan tetapi, ia tetap mengimbau semua pihak untuk optimis terhadap pencapaian solusi dalam proses negosiasi. Hasil dari pertemuan pada tanggal 27 Oktober 2010 di Astrakhan tidak hanya berupa diskusi tetapi juga sebuah aksi dimana pada tanggal 6 November 2010, Armenia mengirim jenazah tentara Azerbaijan yaitu Mubariz Ibrahimov dan Farid Ahmadov, begitu pula Azerbaijan yang mengembalikan jenazah warga negara Armenia.

Pertemuan trilateral di Sochi pada 5 Maret 2011 merupakan pertemuan pertama di tahun tersebut. Ketiga presiden mengeluarkan pernyataan bersama mengenai penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh, menyatakan bahwa mereka

membahas isu-isu praktis untuk merealisasikan kesepakatan yang telah dicapai pada pertemuan sebelumnya di Astrakhan, terutama mengenai pertukaran tawanan perang secepat mungkin. Para pihak juga menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Selain itu, mereka berjanji akan menyelidiki insiden-insiden yang terjadi di sepanjang garis gencatan senjata.

Pada tanggal 24 Juni 2011, diadakannya KTT di Kazan. Akan tetapi, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan mengenai isu-isu yang termasuk dalam prinsip-prinsip dasar. Meskipun Medvedev dilaporkan merasa frustrasi dengan hasil diskusi di Kazan, ia kemudian menugaskan Lavrov untuk mengunjungi Armenia dan Azerbaijan pada tanggal 8 Juli 2011. Dalam penugasan itu, Lavrov membawa serta proposal penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh. Selain itu, Medvedev menitipkan pesan Presiden Armenia dan Azerbaijan melalui Lavrov yang berisi menegaskan kesungguhannya untuk mencapai keberhasilan dalam proses penyelesaian konflik. Ia juga menyatakan bahwa kondisi sudah matang untuk mencapai kesepakatan. Hal ini menunjukkan respon cepat Rusia terhadap situasi yang membutuhkan inisiatif untuk menyelesaikan kebuntuan. (Kristiani 2013).

Selanjutnya, pada tanggal 23 Januari 2012, Medvedev melaksanakan konferensi tingkat tinggi yang ke-10 dengan format trilateral di Sochi, Rusia, yang membahas mengenai penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh. Dalam pertemuan ini, ketiga presiden mencapai kesepakatan mengenai pentingnya untuk terus berupaya dalam menyusun kesepakatan perdamaian. Selain itu, pertemuan di Sochi juga menghasilkan rencana untuk mengembangkan kontak kemanusiaan antara Armenia dan Azerbaijan sebagai bagian dari *Confidence Building Measures*

(CBM). Hal ini akan dilakukan dengan memfasilitasi dialog antara para intelijen, akademisi, dan organisasi masyarakat. Ini merupakan pertemuan terakhir antara Armenia dan Azerbaijan yang difasilitasi oleh Rusia.

Upaya Rusia sebagai mediator dalam konflik Nagorno-Karabakh mendapat apresiasi dari Armenia dan Azerbaijan. Setelah pertemuan di Moskow, pada tanggal 18 Juli 2009, Sargsyan menyatakan bahwa diskusi negosiasi telah menunjukkan adanya perkembangan. Sejalan dengan hal ini, Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Elmar Mammadyarov, menganggap pembicaraan di Moskow telah membawa harapan baru untuk penyelesaian konflik. Mammadyarov juga memuji komitmen Medvedev dalam mendalami masalah demi mencapai solusi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, Elkhan Polukhov, turut mengapresiasi peran Rusia. Ia menyatakan bahwa "Kami percaya bahwa setiap pertemuan di tingkat presiden, terutama dengan partisipasi pemimpin Rusia, sangat penting dalam mencari solusi untuk konflik Nagorno-Karabakh." Apresiasi ini terus berlanjut. Pada tanggal 17 November 2010, saat berkunjung ke Moskow, Sargsyan menyampaikan rasa terima kasih atas upaya mediasi Rusia dan menyatakan bahwa Rusia selalu memainkan peran positif di Kaukasus. Tidak hanya itu, setelah pertemuan komisi kerja sama ekonomi antara Azerbaijan dan Rusia pada tanggal 18 Maret 2011, Wakil Perdana Menteri Azerbaijan, Yagub Eyyubov, juga menyatakan bahwa Azerbaijan menghargai peran Rusia dalam memajukan proses regulasi konflik. Kemudian, Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, juga mengucapkan terima kasih atas upaya mediasi Medvedev selama ini. Sejalan dengan hal itu, pada tanggal 28 Oktober 2011, Menteri Luar Negeri Armenia menyampaikan rasa terima

kasihnya atas upaya Rusia sebagai mediator, "Kami sangat berterima kasih atas upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Presiden Dmitry Medvedev."

Pada tahun 2015, militer Armenia dan Azerbaijan kembali terlibat konfrontasi yang ditandai dengan penembakan dan pengeboman menggunakan mortir serta granat di wilayah Agdam. Insiden ini mengakibatkan dua tentara Armenia dan tiga tentara Azerbaijan tewas (Herszenhorn 2015). Selain itu, berbagai insiden konflik terjadi di perbatasan antara Nagorno Karabakh, Armenia, dan Azerbaijan yang tidak dipublikasikan secara detail kepada publik. Konflik yang memanas ini akhirnya memuncak pada perang terbuka selama empat hari, dari tanggal 2 hingga tanggal 5 April 2016. Situasi tersebut mirip dengan kejadian pada tahun 1994.

Kemudian konflik besar berlanjut pada tahun 2020 yang berlangsung dari 27 September hingga 10 November 2020 atau disebut dengan perang 44 hari. Kebijakan yang diambil oleh Rusia selama konflik dan pasca konflik Nagorno-Karabakh dalam perang 44 hari memiliki 4 pilar utama, Dimana pada pilar pertama dari kebijakan Rusia adalah mempertahankan status sekutunya dengan Armenia. Selanjutnya, pilar kedua yaitu mempertahankan peran mediatornya untuk menyelesaikan konflik. Lalu, pilar ketiga, yaitu tidak merusak hubungan kemitraan strategis dengan Azerbaijan, yang telah dikembangkan secara khusus selama masa jabatan Presiden Vladimir Putin. Terakhir, pilar keempat yaitu dari kebijakan yang diambil oleh Rusia adalah tidak merusak hubungan multidimensi dengan Turki yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir (Jafarov dan Aslanli 2021).

Selama Perang Karabakh yang berlangsung selama 44 hari, upaya mediasi yang dilakukan oleh Rusia terdapat dua cara, upaya pertama yaitu kegiatan yang

dilakukan selama perang di bawah status “*co-chair Minsk Group*”. Rusia selaku *co-chair* bersama dengan presiden Prancis dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan pada 1 Oktober 2020, yang menyerukan untuk menghentikan perang sesegera mungkin dan meminta para pihak untuk kembali ke meja perundingan (President of Russia 2020). Selama perang, pemerintah Rusia juga berkomunikasi secara intens dengan Prancis dan Amerika. Meskipun tidak seintens komunikasi dengan Prancis, kementerian luar negeri Rusia dan perwakilan *Minsk Group* terkadang tetap melakukan komunikasi dengan mitra mereka di Amerika Serikat selama perang berlangsung.

Upaya kedua yang dilakukan sendiri oleh Rusia terbukti lebih aktif, dan efektif daripada mekanisme *Minsk Group*, terutama upaya yang dilakukan di Tingkat kepala negara dan Menteri luar negeri. Contoh pertama dari mediasi tunggal yang dilakukan Rusia yaitu selama perang terjadi pada 10 Oktober 2020, Ketika gencatan senjata kemanusiaan dicapai setelah pertemuan, Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Armenia, dan Rusia yang diadakan di Moskow tersebut atas permintaan langsung Presiden Vladimir Putin (Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 2020). Akan tetapi gencatan senjata kemanusiaan ini tidak terealisasi karena pihak Armenia enggan untuk mematuhi kompromi dan menghentikan perang. Terlepas dari kegagalan ini, Rusia tetap melanjutkan upaya mereka untuk membuat pihak-pihak yang berlawanan untuk menyetujui gencatan senjata.

3.3 Hasil Mediasi oleh Rusia

Hasil dari upaya mediasi gencatan senjata kedua oleh Rusia berhasil ditandatangani pada tanggal 9 November 2020, dilaksanakan kesepakatan damai

antara Armenia dan Azerbaijan. Perjanjian tersebut ditandatangani di Moskow oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Perjanjian ini terdiri dari 9 poin, yaitu:

- 1) Gencatan senjata penuh dan penghentian semua permusuhan dalam konflik Nagorno-Karabakh.
- 2) Pengembalian Distrik Agdam ke Azerbaijan.
- 3) Penempatan kontingen penjaga perdamaian Rusia.
- 4) Mendirikan pos komando penjaga perdamaian untuk menegakkan gencatan senjata.
- 5) Pengembalian Distrik Kalbajar ke Azerbaijan dari Armenia.
- 6) Mengembalikan pengungsi dan orang yang terpaksa mengungsi ke Nagorno-Karabakh dan daerah sekitarnya.
- 7) Pertukaran tahanan perang.
- 8) Pembukaan kembali semua koneksi ekonomi.
- 9) Membuka kembali akses transportasi di wilayah tersebut.

Perjanjian ini mengonfirmasi kemenangan penuh Azerbaijan serta menyelesaikan persoalan utama Azerbaijan yaitu kehilangan wilayah Nagorno-Karabakh dan pengungsian massal penduduknya. Di sisi lain, angkatan bersenjata Armenia mengalami kerugian yang signifikan dan perjanjian ini mencegah kehancuran total mereka. Semua pasukan Armenia diperintahkan untuk mengungsi dari wilayah Nagorno-Karabakh dan kontingen penjaga perdamaian Rusia dikerahkan untuk memastikan gencatan senjata dan stabilitas. Penjaga perdamaian Rusia sekarang mengamankan tidak hanya bagian Nagorno-Karabakh yang masih berada di bawah kendali Armenia, tetapi juga koridor Lachin/Berdzor, yang

diharapkan akan tetap menjadi satu-satunya jalur darat permanen yang terbuka antara Nagorno-Karabakh dan Armenia.

Disepakatinya gencatan senjata pada 9 November 2020, yang mengakhiri perang kedua di Nagorno-Karabakh yang ditandatangani di Moskow, difasilitasi oleh Rusia, lebih tepatnya perjanjian tersebut ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Kesepakatan ini mengatur penghentian segera konflik di sepanjang garis depan peperangan, yang bertujuan mencegah kerusakan lebih lanjut pada pasukan Armenia yang sudah mengalami kerugian besar. Gencatan senjata ini juga mengharuskan pengembalian tiga distrik yang sebelumnya diduduki oleh Armenia di sekitar Nagorno-Karabakh ke Azerbaijan, yang belum berhasil direbut oleh pasukan Azerbaijan selama konflik. Sementara itu, sekitar 70% wilayah Nagorno-Karabakh tetap berada di bawah kendali Armenia, meskipun sebagian besar wilayah lainnya telah dikuasai oleh pasukan Azerbaijan pada tanggal 9 November.

Ketegangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun semakin memuncak ketika konflik ini pecah, yang berujung pada dua peristiwa kekerasan kecil sebelumnya pada April 2016 dan Juli 2020. Selama peperangan, banyak warga sipil dari pihak Azerbaijan dan Armenia yang kehilangan nyawa, lebih dari 5.000 tentara tewas, serta sekitar 70.000 warga Armenia terpaksa mengungsi dari Nagorno-Karabakh.

Setelah adanya perjanjian tersebut seluruh pasukan Armenia diwajibkan untuk meninggalkan wilayah Nagorno-Karabakh, dan pasukan penjaga perdamaian Rusia akan ditempatkan di wilayah tersebut untuk memastikan pelaksanaan

gencatan senjata dan menjaga stabilitas. Pasukan penjaga perdamaian Rusia tidak hanya bertugas mengamankan wilayah Nagorno-Karabakh, tetapi juga bertanggung jawab atas wilayah yang sebelumnya menjadi bagian dari anggotanya. Meskipun Turki tidak menjadi salah satu penandatangan perjanjian gencatan senjata ataupun ketua tambahan dalam Kelompok Minsk, Baku terus-menerus mendesak agar Ankara dilibatkan dalam negosiasi selama berlangsungnya perang.

Perjanjian gencatan senjata mengatur bahwa pasukan Armenia harus mundur dari semua distrik yang masih dikuasai mereka pada 9 November, yaitu sebagian besar wilayah Kalbajar/Karvachar, Lachin/Berzor, dan sebagian barat wilayah Agdam/Aghdam. Meskipun batas waktu untuk penarikan wilayah-wilayah tersebut sangat singkat yaitu pada 1 Desember, ketiga wilayah tersebut telah ditinggalkan oleh militer Armenia dan penduduk sipilnya.

Di beberapa lokasi, warga sipil Armenia yang melarikan diri membakar rumah mereka untuk mencegahnya jatuh ke tangan Azerbaijan. Tindakan tersebut mencerminkan kebencian yang mendalam dan kesulitan dalam membangun hubungan antara kedua kelompok di masa depan. Aspek lain yang bermasalah dari gencatan senjata ini adalah meskipun pasukan Armenia diperintahkan untuk meninggalkan Karabakh, hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana bahkan hingga akhir Januari 2021.

Perjanjian tersebut juga tidak jelas mengenai rincian penarikan pasukan. Sementara Baku menafsirkan ini sebagai kewajiban untuk menarik semua pasukan Armenia. Menurut Yerevan dan pemerintah *de facto* Nagorno-Karabakh, penarikan ini hanya berlaku untuk militer Armenia, sedangkan pasukan dari Republik Nagorno-Karabakh yang memproklamkan diri tetap bisa bertahan. Lalu, pasukan

penjaga perdamaian Rusia tampaknya lebih mendukung penafsiran kedua, meskipun keberadaan pasukan Armenia yang masih ada berpotensi menambah ketegangan.

Sejumlah bentrokan kecil cukup sering terjadi antara unit separatis yang tersisa dan militer Azerbaijan, dengan insiden terbesar terjadi pada 11 Desember. Sekitar seratus militan Armenia menyerang pasukan Azerbaijan di sekitar desa Chaylaggala / Khtsaberd dan Kohna Taghlar / Hin Tagher di distrik Khojavend yang masih dikuasai Armenia pada saat gencatan senjata meskipun sudah dikepung oleh pasukan Azerbaijan. Pertempuran ini baru berakhir setelah pasukan penjaga perdamaian Rusia turun tangan, sementara desa-desa tersebut akhirnya diserahkan kepada pasukan Azerbaijan. Intervensi pasukan penjaga Rusia terjadi meskipun kedua desa tersebut berada di luar mandat mereka, yang menunjukkan bahwa selama pasukan Armenia yang belum sepenuhnya menarik diri dan tetap aktif di wilayah tersebut, risiko bentrokan semacam ini tetap ada.

Kelemahan signifikan lainnya dari perjanjian gencatan senjata adalah ketidakhadiran penyelesaian politik yang menyertainya. Proses negosiasi selama dan setelah perang lebih banyak berfokus pada aspek-aspek teknis militer untuk menghentikan permusuhan, seperti pertukaran tahanan, perlindungan warga sipil, dan memastikan pelaksanaan gencatan senjata yang efektif. Sementara itu, tidak ada kesepakatan yang tercapai terkait dengan masa depan politik wilayah Nagorno-Karabakh yang masih dikuasai oleh Armenia.

Sejak perang berakhir, posisi resmi Azerbaijan tetap konsisten dan tegas dimana semua wilayah yang masih dikuasai Armenia dianggap sebagai bagian integral dari Azerbaijan, sehingga Baku tidak tertarik untuk memberikan otonomi

budaya atau otonomi lainnya kepada penduduk Armenia. Hal ini menyebabkan orang-orang Armenia di Karabakh tidak memiliki pilihan yang realistis, baik secara politik maupun eksistensial, selain bergantung pada perlindungan yang diberikan oleh pasukan penjaga perdamaian Rusia. Mengingat kekalahan pasukan Armenia dalam perang, bagi pihak Karabakh, satu-satunya cara untuk mencegah Azerbaijan merebut kembali seluruh wilayahnya sejak akhir pertempuran adalah dengan keberadaan pasukan Rusia di dalam dan sekitar Nagorno-Karabakh. Dengan kata lain, tanpa adanya jaminan hukum internasional yang diberikan oleh Baku, kehadiran pasukan penjaga perdamaian Rusia menjadi satu-satunya jaminan yang dapat diandalkan oleh orang-orang Armenia Karabakh untuk mempertahankan status de facto pemisahan diri mereka dari Azerbaijan. Hal ini juga membuat kepemimpinan Karabakh semakin dekat dengan Moskow.

Menurut ketentuan perjanjian gencatan senjata, pasukan Armenia diwajibkan untuk meninggalkan Nagorno-Karabakh dan digantikan oleh pasukan penjaga perdamaian Rusia. Unit pertama pasukan penjaga perdamaian Rusia tiba di Armenia pada awal November melalui jalur udara via Georgia (ini adalah operasi pertama sejak perang 2008), dan mulai bergerak ke Azerbaijan pada 10 November. Sejak saat itu, terungkap bahwa Rusia telah merencanakan pengiriman pasukan penjaga perdamaian sejak awal pertempuran, dan topik ini sudah menjadi bagian dari agenda selama negosiasi gencatan senjata yang gagal pada 9-10 Oktober 2020. Akhirnya, Rusia berhasil mengerahkan pasukannya pada gencatan senjata ketiga dan situasi konflik Armenia-Azerbaijan dapat mereda hingga saat ini, walaupun kesepakatan perdamaian secara permanen belum sepenuhnya disepakati antara Armenia dan Azerbaijan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peran Rusia sebagai mediator konflik antara Azerbaijan dan Armenia telah berlangsung sejak awal konflik besar itu pecah pada 1994. Sebagaimana Mediasi menurut Bercovitch, Rusia telah memenuhi syarat-syarat sebagai mediator, dimana dengan sukarela Rusia menjadi mediator konflik sejak Awal konflik hingga sekarang dengan persetujuan dan ditunjuk langsung oleh Armenia-Azerbaijan. Sejak berperan aktif sebagai mediator konflik Nagorno-Karabakh, Rusia telah berkontribusi dalam banyak forum mediasi Nagorno-Karabakh.

Rusia sebagai mediator memilih menggunakan strategi mediasi fasilitatif dikarenakan penggunaan mediasi fasilitatif dinilai lebih relevan untuk persoalan konflik Nagorno-Karabakh, dimana Rusia sebagai mediator memiliki hubungan baik dengan kedua pihak yang berkonflik Armenia maupun Azerbaijan. Mediasi fasilitatif mengharuskan mediator untuk bertindak netral tidak memihak salah satu kubu yang terlibat konflik, dimana posisi Rusia yang sangat rawan jika memihak kepada salah satu kubu, dikarenakan selain menjadi mediator, Rusia juga menyuplai persenjataan kepada Armenia maupun Azerbaijan.

Penggunaan mediasi fasilitatif juga sejalan dengan posisi Rusia yang tidak ingin mengintervensi lebih dalam ataupun memberikan tekanan kepada salah satu pihak yang berkonflik. Rusia dengan mediasi fasilitatifnya hanya memberikan fasilitas komunikasi antar pihak yang berkonflik dan membantu memahami kepentingan masing-masing serta Rusia hanya mengarahkan proses mediasi untuk pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan Solusi permasalahan.

Rusia sebagai mediator memiliki profesionalitas tinggi dimana Rusia tetap berusaha netral walaupun Rusia menjadi penyuplai utama persenjataan kedua negara terutama Armenia. Hal ini dikarenakan Rusia memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan wilayah yang dimana hal tersebut berpengaruh kepada kepentingan Rusia secara ekonomi maupun politik. Rusia juga ingin mendapatkan keuntungan dalam bidang politik, yang bertujuan untuk mencapai tujuan strategis Near Abroad Russia. Hal itu dilakukan demi menjaga dan mengkonsolidasikan kekuatan serta pengaruhnya di daerah bekas wilayah Uni Soviet. Dengan memfasilitasi mediasi Armenia-Azerbaijan pada konflik yang tengah mereka hadapi menjadi kunci utama bagi Rusia untuk melancarkan misinya dalam mencapai tujuannya.

Dalam pelaksanaannya, strategi mediasi fasilitatif berjalan efektif untuk meredam konflik dan membuahkan kesepakatan-kesepakatan antara Armenia dan Azerbaijan, akan tetapi penulis menemukan bahwa strategi fasilitatif pada kasus Nagorno-Karabakh memiliki kekurangan seperti tidak adanya intervensi dari pihak ketiga atau mediator terhadap proses dan keputusan mediasi, sehingga mediasi hanya sebatas diskusi untuk menemukan solusi antara dua pihak dengan kepentingan yang saling berlawanan. Akibatnya sulit bagi kedua pihak untuk menemukan solusi perdamaian yang bersifat permanen.

4.2 Saran

Pada penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk membahas dan meneliti lebih lanjut persoalan Nagorno-Karabakh dari prespektif aktor lain. Penulis juga menyarankan untuk mengulik lebih dalam mengenai teori mediasi oleh

Jacob Bercovitch untuk menganalisis proses mediasi konflik Nagorno-Karabakh dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, I. S. 2022. "Saat Putin Mediasi Konflik Nagorno-Karabakh, Undang PM Armenia dan Presiden Azerbaijan Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 'Saat Putin Mediasi Konflik Nagorno-Karabakh, Undang PM Armenia dan Presiden Azerbaijan'." Kompas.com, 1 November 2022. https://www.kompas.com/global/read/2022/11/01/130000970/saat-putin-mediiasi-konflik-nagorno-karabakh-undang-pm-armenia-dan?page=all#&lgn_method=google.
- Ambrosio, Thomas. 2011. "Unfreezing the Nagorno-Karabakh Conflict? Evaluating Peacemaking Efforts under the Obama Administration." *Ethnopolitics* 10, no. 1 (Maret): n.p.
- Anggraeni, Shafira Khairunnisa. 2022. "Analyzing Russia's Interests in the 2020 NagornoKarabakh Ceasefire Agreement." *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Anonim. 2009. "Another Armenia-Azerbaijan Summit Possible Within Months." *Interfax-America*, 21 Juli. Diakses 11 November 2023. <http://search.proquest.com/docview/443441737?accountid=31533>.
- Arnaya, I Putu Angga Prasada, I Made Anom Wiranata, dan Anak Agung Ayu Intan Prameswari. t.t. "Peran Dari OSCE Minsk Group Dalam Mediasi Konflik Di Wilayah Nagorno-Karabakh."
- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. 2020. "Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin Bəyanatı." 10 November. Diakses 15 November 2024. <https://president.az/az/articles/view/45923>.
- Babayan, Aza. 2009. "Armenia, Azerbaijan 'Satisfied' With Fresh Summit." Radio Free Europe, 4 Juni. Diakses 11 November 2023. https://www.rferl.org/a/Armenia_Azerbaijan_Satisfied_With_Fresh_Summit/1747084.html.
- Bartuzi, W., dan Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, K. S. 2008. *Abkhazia, South Ossetia, Nagorno-Karabakh: unfrozen conflicts between Russia and the West*. Warsaw: Center for Eastern Studies.
- Bechev, Dimitar. 2020. "What does the Nagorno-Karabakh deal mean for Turkey and Russia?" Aljazeera.com, 18 November. Diakses 2024. <https://www.aljazeera.com/opinions/2020/11/18/the-nagorno-karabakh-settlement-and-turkish-russian-relations>.
- Bercovitch, Jacob. 1991. "International Mediation." *Journal of Peace Research* 28, no. 1: 3-6.
- . 1992. "Mediators and Mediation Strategies in International Relations." *Negotiation Journal* 8: 99-112.
- Bercovitch, Jacob, J. T. Anagnoson, dan D. L. Willie. 1991. "Some Conceptual Issues and Empirical Trends in The Study of Successful Mediation in International Relations." *Journal of Peace Research* 28, no. 1: 7-17.
- Bercovitch, Jacob, dan Allan Houston. 1996. "The study of international mediation: Theoretical issues and empirical evidence." Dalam *Resolving International Conflicts: The Theory and Practice of Mediation*, disunting oleh Jacob Bercovitch. n.p.

- Bercovitch, Jacob, dan Jeffrey Z. Rubin, ed. 1992. *Mediation in international relations: Multiple approaches to conflict management*. St. Martin'S Press, Inc.
- Branch, Anthony. 2018. "Armenia and the South Caucasus: A New Security Environment." *Connections* 17: 47-60.
- Carment, David, Y. Samy, dan S. e. Achkar. 2009. "Protracted conflict and crisis mediation." Dalam *International Conflict Mediation: New Approaches and Findings*, disunting oleh Jacob Bercovitch dan Scott Sigmund Gartner. n.p.
- Caucasus Edition. 2013. "Assessing Russia's role in efforts to resolve the Nagorno-Karabakh conflict." 1 Februari. Diakses 2023. <https://caucasusedition.net/assessing-russias-role-in-efforts-to-resolve-the-nagorno-karabakh-conflict-from-perception-to-reality/>.
- Celestine, Bohlen. 2021. "Armenia's Postwar Crisis: What to Know." Council on Foreign Relations, 1-7.
- Companjen, Françoise. 2010. "Nagorno-Karabakh: Embedded in Geopolitics." *Atlantisch Perspectief* 34: 9-14.
- Cornell, Svante E. 1999. *The Nagorno-Karabakh Conflict*. Uppsala: Uppsala University.
- Crisis Group Europe Briefing N91. 2020. "Improving Prospects for Peace after the Nagorno- Karabakh War." International Crisis Group, 1-18.
- Croissant, Michael P. 1998. *The Armenia-Azerbaijan conflict: causes and implications*. Bloomsbury Academic.
- de Waal, Thomas. 2003. *Black Garden: Armenia and Azerbaijan Through Peace and War*. NYU Press.
- . 2016. "Prisoners of the Caucasus: Resolving the Karabakh Security Dilemma." Carnegie Europe, 16 Juni. Diakses 12 November 2023. <https://carnegieendowment.org/research/2016/07/prisoners-of-the-caucasus-resolving-the-karabakh-security-dilemma?lang=en¢er=europe>.
- Demytyeva, Victoria. 2011. "Russian Ambassador: As a result of the international efforts, there is a chance to reach serious agreements on the resolution of Nagorno Karabakh conflict." APA, 8 Juni. Diakses 11 November 2023. <https://en.apa.az/news/148983>.
- Deutsch, Morton. 1983. "Conflict Resolution: Theory and Practice." *Political Psychology* 4, no. 3: 431-53. doi:10.2307/3790868.
- . 2006. *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Dewantara, Andhika, dan Muhammad Yamin. 2019. "Analisis Peran Rusia sebagai Mediator dalam Penyelesaian Konflik Nagorno Karabakh Periode 2008-2016." *Insignia Journal of International Relations* 64-82.
- Druckman, D., D. Solomon, dan K. Zechmeister. 1972. "Effects of representational role obligations on the process of children's distribution of resources." *Sociometry* 35, no. 5: n.p.
- Gabuev, Alexander. 2020. "Viewpoint: Russia and Turkey - unlikely victors of Karabakh conflict." BBC.com, 12 November. Diakses 2024. <https://www.bbc.com/news/world-europe-54903869>.
- Galushko, Irina. 2010. "The road to reconciliation - Armenia, Azerbaijan hold talks in St. Petersburg." RT.com, 18 Juni. Diakses 11 November 2023. <https://www.rt.com/russia/armenia-azerbaijan-karabakh-reconciliation/>.
- Gartner, Scott Sigmund, dan Jacob Bercovitch, ed. 2009. *International Conflict Mediation: New Approaches and Findings*. Routledge.

- Greig, J. M., dan P. H. Diehl. 2009. "Softening up: Making conflicts more amenable to diplomacy." Dalam *International Conflict Mediation: New Approaches and Findings*, disunting oleh Jacob Bercovitch dan Scott Sigmund Gartner. n.p.
- Greig, M. J., dan P. M. Regan. 2008. "When do They Say Yes? An Analysis of The Willingness to Offer and Accept Mediation in Civil Wars." *International Studies Quarterly* 52, no. 4: 759-81.
- Higgins, Holly. t.t. "Applying Confidence-Building Measures in a Regional Context." Institute for science and international security. Diakses 11 November 2023. <https://isis-online.org/uploads/conferences/documents/higginspaper.pdf>.
- Huseynov, Vasif. 2020. *The July 2020 Clashes on the Armenia-Azerbaijan Border and Implications for the Old Conflict*. Vienna: Institute Fur Sicherheitspolitik.
- International Crisis Group. 2020. "Preventing a Bloody Harvest on the Armenia-Azerbaijan State Border." *Crisis Group Europe Report N°259* 1-2.
- Jafarov, Nazim, dan Araz Aslanli. 2021. "Russia's Policy during the 44-day of the Karabakh War." *Insight Turkey* 222.
- Jafarova, E. 2011. *Achieving Security and Stability in the Region of South Caucasus: What Role for International Organizations?* Universitat Wien.
- Klever, Emma. 2013. "The Nagorno-Karabakh conflict between Armenia and Azerbaijan: An overview of the current situation." *European Movement International* 2.
- Kristiani, Ensi Adistya. 2013. "Keterlibatan Rusia Dalam Upaya Resolusi Konflik Nagorno-Karabakh Antara Armenia dan Azerbaijan 2008-2012." *Media Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 3.
- Kucera, Joshua. 2019. "Pashinyan calls for unification between Armenia and Karabakh." *Eurasianet.org*, 6 Agustus. Diakses 21 September 2024. <https://eurasianet.org/pashinyan-calls-for-unification-between-armenia-and-karabakh>.
- Mason, Simon. 2007. *Mediation and Facilitation in Peace Processes*. International relations and security network.
- Mayer, T. R. 2013. *Intractability and Mediation of The Nagorno-Karabakh Conflict*. Naval Postgraduate School.
- Mehdiyev, Mushvig. 2022. "Azerbaijan, Russia To Develop Military-Technical Cooperation Under New Declaration." *CaspianNews.com*, 23 Februari. Diakses 2024. <https://caspiannews.com/news-detail/azerbaijan-russia-to-develop-military-technical-cooperation-under-new-declaration-2022-2-23-0/>.
- Mikaelian, Hrant. 2017. "Societal Perceptions of the." *Caucasus Institute Policy Paper* 11.
- Minasyan, Armen. 2010. "New 'Petersburg Proposals' are on the agenda." *Panorama.am*, 28 Juni. Diakses 11 November 2023. <https://www.panorama.am/en/news/2010/06/28/petersburg-proposals/1086486>.
- Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. 2020. "Заявление министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения." 10 Oktober. Diakses 15 November 2024. https://archive.mid.ru/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts/-/asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/4377004?p_p_id=101_INSTANCE_xIEMTQ3OvzcA&_101_INSTANCE_xIEMTQ3OvzcA_languageId=ru_RU.
- Minsk Group. 2016. "Joint Statement of the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, Secretary of State of the United States of America and State Secretary for Europe Affairs of France." 16 Mei. Diakses 2023. <https://www.osce.org/mg/240316>.

- Minzarari, Dumitru. 2020. "Russia's Stake in the Nagorno-Karabakh War: Accident or Design?" SWP-Berlin.org, 12 November. Diakses 2024. <https://www.swp-berlin.org/en/publication/russias-stake-in-the-nagorno-karabakh-war-accident-or-design>.
- Mustofa, Ahmad Zainal. 2021. "ANALISIS KEPENTINGAN RUSIA DAN TURKI DALAM KONFLIK ARMENIA-AZERBAIJAN PADA TAHUN 2020." *Jurnal PIR* 6, no. 1 (Agustus): 1-13. <http://dx.doi.org/10.22303/pir.6.1.2021.01-13>.
- Nalbandian, Edward. 2011. "The level, volume, content and scope of relations between Armenia and Russia speak for themselves." Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Armenia, 24 Oktober. Diakses 11 November 2023. <https://www.mfa.am/en/interviews-articles-and-comments/2011/10/24/inter/2541>.
- Novosti, Ria. 2010. "Russia, Armenia deny stalemate in Karabakh dispute." Sputnik International, 14 Januari. Diakses 11 November 2023. <http://en.rian.ru/exsoviet/20100113/157525678.html>.
- Pashayeva, Gulshan. 2009. "The Nagorno-Karabakh Conflict in the Aftermath of the Russia-Georgia War." *Turkish Policy Quarterly*: 55-69.
- Pratama, Tio Ari, Michael Ahmad Zulha, dan Gili Argenti. 2023. "Relevansi Rusia dan Turki Pada Konflik Armenia-Azerbaijan di Wilayah Nagorno-Karabakh." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 10: 349-58. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7985046>.
- President of Russia. 2020. "«Заявление президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху»." 1 Oktober. Diakses 14 November 2024. <http://kremlin.ru/events/president/news/64133>.
- Pruitt, Dean G. 2013. *Negotiation Behavior*. Disunting oleh P. Warr. Elsevier Science.
- Rashidoghlu, Azer. 2016. "What Kind of Model Nagorno-Karabakh will be Granted with? Important Comments from Ilham Aliyev." 19 Oktober. <http://www.avropa.info/az/post/119654.html>.
- RFE/RL. 2020. "Russian Peacekeepers Deploy To Nagorno-Karabakh After Truce As Political Crisis Hits Armenia." 10 November. Diakses 2024. <https://www.rferl.org/a/russian-peacekeepers-deploy-to-nagorno-karabakh-after-truce-as-political-crisis-hits-armenia/30940268.html>.
- Rubin, Jeffrey Z., dan Bert R. Brown. 1975. *The Social Psychology of Bargaining and Negotiation*. Elsevier Science.
- Russell, Martin. 2020. *Armenia and Azerbaijan on the brink of war*. Members' Research Service PE 659.267, Oktober 2020.
- Rytövuori-Apunen, Helena. 2021. "The 2020 Nagorno-Karabakh war in Russia's geopolitical puzzle." *Politiikasta.fi*, 17 Februari. Diakses 2024. <https://politiikasta.fi/en/the-2020-nagorno-karabakh-war-in-russias-geopolitical-puzzle/>.
- Samedzade, Bakhtiyar Aslanov Sevinj. 2017. "The Positions of Political Parties and Movements in Azerbaijan on the Resolution of the Nagorno-Karabakh Conflict." *Caucasus Edition Journal for Conflict Transformation*, 1 Desember. Diakses 12 November 2023. <https://caucasusedition.net/the-positions-of-political-parties-and-movements-in-azerbaijan-on-the-resolution-of-the-nagorno-karabakh-conflict/>.
- Sargsyan, I. 2003. *INTERNATIONAL MEDIATION IN THEORY AND PRACTICE: LESSONS OF NAGORNO-KARABAKH*. Armenian Center for National and International Studies.

- Shirinyan, A. 2016. "The Evolving Dilemma of the Status Quo in Nagorno-Karabakh." *Brill Nijhov* 27.
- Shirinyan, Anahit. 2013. "Assesing Russia's role in efforts to resolve the Nagorno Karabakh conflict: From perception to reality." *Caucasus Edition: Journal of Conflict Transformation*.
- Simão, Licinia. 2010. "Engaging Civil Society in the Nagorno." MICROCON Policy Working Paper 6.
- Situmorang, M. 2014. "FACILITATIVE MEDIATION ON THE IMPASSE IN PAPUA." *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK* 11, no. 1 (April): n.p.
- Sparov, A. 2012. "Why Autonomy? The Making of Nagorno-Karabakh Autonomous Region 1918-1925." *Europe-Asia Studies* 64, no. 2: n.p.
- Spector, dan Korula. 1992. *Facilitative Mediation in International Disputes: From Research to Practical Application*. IIASA Working Paper.
- Suleymanly, Nasrin. 2012. *An Analysis of the Nagorno-Karabakh Problem*. Offset Co. Ltd Press.
- Tariverdiev, Elmira. 2011. "Talks on Nagorno-Karabakh: the annual déjà vu." Trend News Agency, 22 Desember. Diakses 11 November 2023. <https://en.trend.az/azerbaijan/karabakh/1972014.html>.
- TASS. 2020. "Russia to allocate \$2.25 million for International Red Cross to aid Nagorno-Karabakh." Diakses dari <https://tass.com/politics/1232609>.
- The Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation. 2023. The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 31 Maret. Diakses 19 April 2024. https://mid.ru/en/foreign_policy/fundamental_documents/1860586/.
- The European Armenian Federation for Justice and Democracy. 2011. *Towards a Fair and Just Resolution THE MOUNTAINOUS (NAGORNO) KARABAKH CONFLICT*. Brussels: The European Armenian Federation for Justice and Democracy.
- The Republican Party of Armenia. 2017. "Republican Party of Armenia Program." 8 Desember. Diakses 2023. <http://www.hhk.am/en/program/>.
- The Statistical Committee of the Republic of Armenia. 2020. *Figures of Marz of Tavush*. The Statistical Committee of the Republic of Armenia.
- Trend. 2012. "Russia hopes for progress in Nagorno-Karabakh conflict resolution in 2012-2013." Trend News Agency, 8 Agustus. Diakses 11 November 2023. <https://en.trend.az/azerbaijan/karabakh/2054345.html>.
- Waugh, B. 2019. "Facilitative Mediation — Brenda Waugh Law & Mediation | DC, VA & West Virginia." Brenda Waugh. Diakses dari <https://www.brendawaugh.com/blog/2019/7/29/facilitative-mediation-a-good-model-for-many-types-of-conflicts>.
- Weise, Zia, Jan Cienski, dan David Herszenhorn. 2020. "The Armenian-Azerbaijan conflict explained: Politico." Politico.eu, 28 September. Diakses 21 September 2024. <https://www.politico.eu/article/the-nagorno-karabakh-conflict-explained-armenia-azerbaijan/>.
- Yepifantsev, A. 2011. "Russia in Transcaucasia: What's Gone Wrong?" *Russia in Global Affairs*, 24 September. <https://eng.globalaffairs.ru/articles/russia-in-transcaucasia-whats-gone-wrong/>.
- Yerevan. 2010. "Azerbaijan Confirms New Karabakh Peace Plan Presented." RadioFreeEurope / Radio Liberty, 23 Juli. https://www.rferl.org/a/Azerbaijan_Confirms_New_Karabakh_Peace_Plan_Presented/2108232.html.